INFRASTRUKTUR POLITIK

Dalam Bingkai NKRI

DR. H. CECEP SURYANA, M.SI.
FARHANDHIKA A, FINA AMELIA, FRIDA RAHAYU B, GINA AMALIA, HAMIA HUSNI F, IYAM MARYAM F, MILLAH AZHARI.

Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI

Penulis :
H. Cecep Suryana
Farhandhika A
Fina Amelia
Frida Rahayu B
Gina Amalia
Hamia Husni F
Iyam Maryam F
Millah Azhari

ISBN: 978-623-88132-9-2

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah memberikan kekuatan juga kesabaran kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan buku Insfastruktur Politik dalam Bingkai NKRI yang telah lama disusun.

Dengan menerbitkan buku ini, kami bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau perspektif tentang dasar politik Indonesia, termasuk sinifikansi, perspektif, proses politik, tujuan, peran, fungsi, dan hal lainnya dari sistem politik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan agar pembaca dapat mengetahui juga memahami lebih jauh tentang insfatruktur politik yang ada di Indonesia dengan membaca buku ini.

Kami juga ucapkan terima kasih dan mendukung pihak-piak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pembuatan dan penerbitan buku sistem politik Indonesia, khususnya Allah swt, juga kepada Dr. H. Cecep suryana, M.Si. Ada banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan juga namanya yang membantu mendukung penulisan buku ini, orang tua, teman, penerbit, dll.

Dengan mempelajari sistem politik Indonesia, buku ini menjelaskan bagaimana insfastrukstur politik sesuai atau cocok dengan Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai panduan alternatif bagi siswa dan guru.

Harapan penulis dalam menyusun buku ini tentu saja tidak lebih dari berbagi ilmu kepada para pembaca agar bermanfaat bagi orang-orang yang membaca buku ini dan untuk meningkatkan kecintaan pribadi mereka terhadap bangsa Indonesia. Penulis percaya bahwa pembaca tidak akan pernah berhenti haus akan ilmu dan mencari ilmu lain. Harapan terbesar penulis bagi pembaca adalah menerapkan makna buku ini kepada orang lain.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki banyak kekurangan, baik dari materi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulisa sangat mengharapkan kritik juga saran untuk penyempurnaan buku ini demi tercapainya tujuan memberikan informasi kepada pembaca.

Bandung, 20 Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Sistem Politik 1
B. Pengertian sistem politik secara istilah 4
C. Pengertian sistem politik menurut para ahli 4
D. Teori Sistem 6
E. Teori Sistem Dunia 8
F. Pengaruh Teori Sistem Dunia 11
G. Keterkaitan Dampak Sistem Dunia dan Kecenderungan SistemPolitik Negara 12
BAB 2. PENDEKATAN SISTEM POLITIK 15
A. Pendekatan dalam Sistem Politik 15
B. Pendekatan Fungsional Struktural 17
C. Analisis sistem politik oleh David Easton 20
D. Input, Output, dan Rata-rata dalam Sistem Politik 23
BAB 3 FUNGSI SISTEM POLITIK 29
A. Pengertian Sosialisasi Politik 29
B. Fungsi Rekrutmen Politik 30
C. Fungsi Komunikasi Politik 32
D. Fungsi Stratifikasi Sosial 35
E. Pendidikan Politik 36
F. Fungsi Input Sistem Politik 40
G. Fungsi Output Sistem Politik 41
BAB 4. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA 44
A. Masa Pra-Kolonial (Masa Kerajaan) 44
B. Masa Kolonial 47
C. Demokrasi Liberal 49
D. Demokrasi Terpimpin 53

E. Demokrasi Pancasila 55
F. Masa Reformasi 57
BAB 5. BUDAYA POLITIK INDONESIA 60
A. Pengertian Budaya Politik 60
B. Tipe Tipe Budaya Politik 61
C. Sosialisasi dan Partisipasi Politik Pada Masyarakat 63
D. Budaya Politik Indonesia 64
E. Budaya Politik Era Reformasi 65
BAB 6. INFASTRUKTUR POLITIK INDONESIA 66
A. Definisi Infrastruktur Politik Indonesia 66
B. Komponen Infrastruktur Politik, Peran beserta Fungsinya 67
C. Kredibilitas Media Massa dalam Politik Indonesia 72
D. Pengaruh Media Massa dalam Demokratisasi Politik 74
E. Politik dan Mahasiswa 77
F. Media Sosial Sebagai Alat untuk Mengkritisi atau Pendukung Kebijakan Publik 78
BAB 7. PERAN DAN FUNGSI KOMPONEN-KOMPONEN INFASTRUKTUR POLITIK INDONESIA 82
A. Partai Politik 82
B. Golongan Kepentingan 85
C. Media Komunikasi Politik 88
D. Golongan Penekanan 91
E. Tokoh Politik 95
DAFTAR PUSTAKA 98
BIOGRAFI PENULIS 102

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Pengertian Sistem Politik

Istilah sistem politik mengandung pengertian kepada sebuah proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Aspek yang terdapat pada sistem politik merupakan sebuah perjuangan kelompok tertentu di dalam negara untuk memperoleh posisi pemerintahan dengan melalui sebuah proses pemilihan umum. Dalam sistem politik disebuah negara komponen – komponen yang diatur meliputi; rakyat dalam negara tersebut, orang-orang yang menduduki posisi di pemerintahan, proses pemilihan pejabat pemerintahan,struktur pemerintah, kebijakan publik, pusat kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan kepada daerah.

Sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewudkan tujuan, pengambilan keputusan, seeksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang didalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif,eksekutif dan yudikatif). Dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan di perlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut dii Indonesia sendiri adalah yang diaturr dalam Undang Undang Dasar 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA,MK dan KY.

a. Pengertian Sistem Politik secara Bahasa

Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *“systema”* yang berarti:

1. Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *(shrode dan voich, 1974:115)*
2. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur *(Awad,1979:4)*

Dengan demikian, kata “sytema” berarti sehimpunan bagian

atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral dan merupakan satu keseluruhan. Dalam berkembangnya, istilah itu mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti, bergantung pada objek dan cakupan pembicaraannya. Akan tetapi, setiap definisi mewujudkan gagasan dari setiap objekatau unsur yang berada dalam hubungan struktural dan karakteristiknya masing-masing yang satu dan lainnya berineraksi pada dasar karakteristik tertentu.

Makna sistem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politiksehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Pembahasan dengan cara tersebut dapat dilihat dalam perspektif liguistik dan terminologisnya. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen. Unsur setiap komponen itu saling berhubungan secara struktural dan fungsional, ada keterikatan dalam mencapai tujuan utama.

Dilihat dari segi bentuknya, pengertian sistem disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat immaterial juga pada hal material. Untuk yang bersifat immaterial, penguraian atau penentuan modelnya berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjau yang bersangkutan. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi daripada cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, sertasering bersifat otomatis.

Dengan demikian, sistem harus memenuhi unsr-unsur yang meliputi komponen seperti relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saing berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau negara.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya *negara-kota*. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi oranglain agar menerima pandangannya.

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat

dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keptusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tertentu. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukan suatu proses yang langgeng.

Karl Marx juga melakukan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan mode produksi dan hubungan produksi yang berwujud kelas sosial. Meskipun penjelasan Marx menekankan pada aspek ekonomi sebagai faktor yang menentukan aspek yang lain, keberadaan kelas tersebut tidak terlepas dari persoalan hubungan politik dan sosial budaya yang menyertainya.

Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Sistem politik adalah kesatuan perangkat yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik ditunjukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan padaanalisis negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik yang diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup.

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk, sebab sistem politik merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem kepercayaan dan yang lainnya. Sitem politikpun merupakan abstraksi seputar pendistribusian di kalanganmasyarakat.

Seperti yang telah di jelaskan, masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur tetapi terdiri atas multistruktur. Sistem yang biasanya di pelajari kinerja nya adalah sistem ekonomi, sistem politik, sistem agama, sistem sosial atau sistem budaya psikologi. Beragam jenis sistem yang berbeda tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tentunya. Perbedaannya terletak pada dimensi ontologis, sedangkan persamaanya terletak pada konsep yang diukur antara satu sistem dan yang lainnya.

Dalam memahami sistem politik Indonesia, seperti halnya

memahami sistem- sistem lain, ada beberapa variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah sebagai berikut.

1. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik.
2. Nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur disetiap sistem politik yang wujudnya adalah; kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran dan keadilan.
3. Norma adalah peraturan baik tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antaraktor dalam segi politik.
4. Tujuan sistem politik sama halnya norma, juga terdapat dalam konstitusi.
5. Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat

B. Pengertian sistem politik secara istilah

Politik secara istilah dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara danorganisasi masyarakat.

C. Pengertian sistem politik menurut para ahli

1. David Easton

   Sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Rusadi Kantaprawira

   Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan fungsi yang bekerjadalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.
3. Jack C. Plano

   Sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut.
4. Robert A. Dahl

Sistem politik mencakup dua hal yaitu pola hubungan yang tetap antarmanusia dan melibatkan sesuatu yang luas kekuasaan, aturan serta kewenangan.

5. Drs. Sukarno

   Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan neagara dan hubungan dengan negara.

6. Gambriel Almond

   Sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang bisa di jumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian.

7. Samuel P. Huntington

   Sistem politik adalah makna perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai poliik dan yang bermakna dalam masyarakat.

8. Prayetno

   Sistem politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur yang berkuasa bagimasyarakat.

9. Prof. Sri Sumantri

   Sistem politik adalah pemerintah dari iinteraksi masyarakat yang berbentuk interaksi antara suprastuktur dan inprastruktur politik.

10. Fredrick W. Frey

    Sistem politik adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui makna alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan brsifat otoritatiaf dibuat dan iimplementasikan.

11. David Easton

    Sistem politik adalah hubungan yang di generalisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat.

12. Drs. Abdul Kadir

    Sistem politik adalah sistem yang sah, yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat.

13. Robert A. Dahl

    Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkan dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yurisdiksi ataupun dominasi.

14. M. Bahrudin Podomi

    Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal maupun eksternal.

15. Sukarna

    Sistem politik adalah suatu prosedur untuk mengoprasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoprasikan interaksi pemerintah dan rakyat atupun sebaliknya, mengoprasikan interaksi negara dengan rakyatnya.

16. Dr. Wiku Adisasmito

    Sistem politik adalah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah.

D. Teori Sistem

Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosialyang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen- elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik atau hubungan dua arah dan bahkan banyak arah. Politik sebagai sistem adalah bagian yang tak terelakan sebagai salah satu istitusi sosial yang mengatur dan menyelengarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat dan sebagai sebuah bangsa.

Perspektif diatas jika dikontekstualkan pada faktor politik di Indonesia sebagai sebuah sistem, seperti fenomena partai politik di Indonesia yang berbasis masa islam sering kali dihadapkan pada faktor bahwa pengaruh struktur sosial elit keagamaan cukup besar pada keberadaan partai politik, bahkan sering kali ketika sebuah partai menghadap persoalan besar, struktur sosial elit, keagamaan ini menjadi tokoh kunci bagi bekerjanya partai politik. Misalnya, faktor berpengaruhnya K.H Maimun Zubair (mbah Mun) pada partai persatuan pembangunan (PPP). Hubungan pengaruh struktur elit

keagamaan pada fungsi harmoni politik adalah faktor yang menggambarkan hubungan timbal balik atau hubungan saling memengaruhi yang menjadi ciri sebuah sistem. Sebaliknya, kita bisa mencermati fakta hubungan antar elit negara-negara di dunia. Ketenggangan dua atau lebih negara sering kali juga karena kegagalan elit politik egara tersebut.

Sebagai supra struktur politik dalam membangun komunikasi antara negara-negara tersebut dalam menyelesaikan persoalan. Misalnya, dicermati dalam kasus hubungan antara Amerika dengan Tiongkok, antar Korea Selatan dengan Korea Utara, antara Israel dengan Palestina atau antara Rusia dengan Turki. Faktor tersebut meyakini penulis bahwa perspektif teori sistem bisa memberikan gambaran keterhubungan dan pengaruh antar struktur dna fungsi dalam sistem baik antara sub sistem maupun dalam sistem besar dunia.

Ilmuan yang dinilai banyak kalangan paling giat mengembangkan teori sistem adalah Niklas Luhman (1968) dan Keneth Bailey (1978). Keduanya hidup pada pertengan abad ke20. Sebelumnya kedua ilmuan diatas, berfikir lainnya membicarakan sistem adalah Walter Buckley (1967) melalui karyanya yang berjudul: Sociologhy and Modern System. Menurut Buckley, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem sebagai berikut:

1. Dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial.
2. Memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil yang paling objektif sampai dengan yang paling subjektif.
3. Membahas beragam hubungan antara sosial tidak parsial.
4. Keseluruhan aspek dipandan dalam konteks terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi
5. Bersifat integratif.

Selanjutnya, Buckley memperkenalkan 3 jenis sistem, yaitu: (1) sistem sosial budaya, (2) sistem mekanis dan (3) sistem organis. Dalam sistem mekanis, saling keterkaitan antar bagian di dasarkan pada tranfer energi, dalam sistem organis kesaling keterkaitan antar bagian lebih di dasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi, dalam sistem sosial budaya kesaling keterkaitan lebih di dasarkan pada pertukaran informasi.Dalam memahami sistem sosial, dikenal 2 pendekatan yaitu pendekekatan sibernetis dan pendekatan ekuilibrium. Umpan balik merupakan aspek esensial dari pendekatan sibernetis, friksi, pertumbuhan,

efolusi dan perubahan sosial dapat dipelajari dengan pendekatan sistem sibernetis. Sementara itu, keseimbangan fungsi merupakan esensi dasar pendekatan ekuiblibium.teori sistem mengenal dua komsep krusial, yaitu entropi dan negontropi.entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja, sedangkan negontropi adalah kecenderungan sistem pada stuktur yang lebih besar. Sistem dalam suatu msyarakat yang tertutup cenderung entropis, sedangkan sistem pada masyarakat yang terbuka cenderung negontropis.

Konsep sistem terfokus pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian- bagian dan dinamikan hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan atau keseluruhan. Inti dari pemahaman teori sistem adalah setiap bagian berpengaruh pada keseluruhan atau sesuatu tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain. Ketika organisasi dipandang sebagai sebuah sistem sosial, maka seluruh aspek harus di perhatikan atau dianggap penting.

Menurut John R. Fisher (System Theory and Stuctural Funtionalism,2010), di kemukakn bahwa teori sistem adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan sangat abstrak, yang berfungsi mengarahkan fikiran kita, namun terikat pada berbagai penafsiran. Para pakar seperti Ludwig Fonbertalanffy (1968). Russel L. Achkhoff dan lain-lain menyimpulkan bahwa ciri-ciri meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterintegrasian (integration)
2. Keteraturan (regularty)
3. Keutuhan (wholeness)
4. Keterorganisasian (organization)
5. Keterekatan
6. Kompenen satu sama lain
7. Keterhubungan komponen satu sama lain
8. Kebergantungan komponen satu sama lain

Setiap pembahasan tentang sistem selalu menyangkut interdependesi. Interdependesi menunjukan saling bertanggungan diantara komponen atau bagian dalam suatu sistem. Dalam praktisnya perspektif faktor tunggal dalam kehidupan sosial, demikian pula dalam politik makro maupun mikro.

E. Teori Sistem Dunia

Carlos A.Martinez vela dalam *world system theor* (2001) Mengemukakan bahwa teori sistem duniasering kali dipahami sebangai sebuah pemabangian kerja secara triorial dalam produksi,pertukaran

barang,danbahan mentah.pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomo dunia secra keseluruhan, pembangian kerja ini menyebabkan ada nya dua daerah yang saling bergantung antara negara inti dengan negara pinggiran. Secara geografi dan budaya, kedua negara tersebut sama sekali berbeda, satu fokus pada padat modal, dan satu lagi pada padat karya. Sementara itu, negara semi perferi bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran, serta memiliki campuran jenis kegiatan yang ada di negara lain dan periferi. Persferfektif teori sistem dunia ini mempertegas konektifitas antar negara sekaligus konektifitas antar sistem politik antar negara.

Frank W. Elwell dalam *Wallersteins Word System Theory* (2005) mengemukakan bahwa negara modern merupakan bagian dari sistem dunia kapitalisme. Sistem inilah yang ingin dipahami oleh Imanuel Wallenteins. Imanuel Wallenteins percaya bahwa hanya ada tiga jenis sosial, yaitu mini sistem, kerajaan dunia dan ekonomi dunia pertama. Menyebut mini sistem sebagai masyarakat homogen yang dipelajari antropologi. Masyarakat seperti ini melakukan kegiatan diantaranya berguru, mengembara, dan meramu. Masyarakat ini juga bisa disebut masyarakat heltikultural, yang mempunyai unit ekonomi dan memproduksi semuua barang dan jasa dalam sistem sosial budaya mereka sendiri. Kedua, sistem kerajaan dunia memiliki ekonomi yang di dasarkan pada ekstrasi barang dan jasa dari daerah pinggiran. Sebagian dari surplus aktivitas ekonomi tersebut digunakan untuk membayar para administrator yang mengekstar barang dan jasa tersebut, membayar militer untuk memastikan bahwa kekuasaan akan tetap berlanjut, serta sisanya digunakan oleh para penguasa politik di kerajaan. Ketiga, sistem ekonomi dunia kekuasaanya tidak hanya pada militer. Meskipun demikian, sistem ini masih memiliki kesamaan dengan sistem kerajaan dunia dalam hal ektraksi barang dan jasa dari daerah pinggiran.

Teori sistem dunia dimaknai sebagai bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagai dalam tiga bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomi dan kesemuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggir dan menuju negara semi pinggiran ditemukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu atau kombinasi dari strategi promosi, dan strategi berdiri diatas kaki

sendiri. Selain itu, upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran melakukan perluasan, pasar serta introduksi teknologi modern. Kemampuan bersaing di pasar internasional melalui perang harga dan kualitas.

Negara semi pinggiran yang disampaikan oleh Wallenstein (dalam *word system An Introduction*, 2004) merupakan sebuah pelengkap dari konsep sentral dan pinggiran yang disampaikan oleh teori depentrasi. Alasan sederhana yang disampaikanya adalah banyak negara yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut sehingga wllesntain mencoba menawarkan konsep pembagian dunia menjadi tiga kutub, yaitu sentral, semi pinggiran dan pinggiran. Terdapat alasan yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis dunia saat ini memerlukan kategori semi pinggiran sebagai berikut.

1. Dibutuhkannya sebuah perangkat politik dalam mengatasi disintegrasi sistem dunia.
2. Dibutuhkanya sarana pengembangan modal untuk industri dari negara sentral.

Didintegrasi sistem dunia sangat mungkin terjadi sebagai akibat "kecemburuan" negara pinggiran dengan kemajuan yang dialami oleh negara sentral. Kekhawatiran akan timbulnya gejala disintegrasi dikarenakan jumlah negara miskin yang banyak harus berhadapan dengan sedikit negara maju. Solusi yang ditawarkan adalah membentuk kelompok penengah antara keduanya atau adanya usaha mengurangi disparitas antara negara maju dan negara miskin. Seacara ekonomi, negara maju akan mengalami kejenuhan investasi sehingga diperlukan perluasan atau ekspansi pada negara lain. Upaya perluasan investasi ini membutuhkan lokasi baru pada negara miskin. Negara ini kemudian dikenal dengan istilah negara semi pinggiran, Wallestein mengajukan tesis tentang perlunya gerakan populis berkala nasional digantikan oleh perjuangan berkelas di dunia. Lebih jauh Wallestein (2004) menyatakan bahwa bangunan nasional merupakan kebijakan yang merusak tata sistem ekonomi dunia alasan yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

a. Impian tentang keadilan ekonomi dan politik salah satu keniscayaan bagibanyak negara.
b. Keberhasilan pembangunan pada bebrapa negara menyebabkan perubahanradikal dan global terhadap sistem ekonomi dunia.
c. Strategi pertahanan suplus ekonomi yang dilakukan oleh produsen

berbedadengan perjuangan kelas yang berskala nasional.

Perspektif Wallesntein tersebut jika dilihat dengan persfektif kritis sesungguhnya tidak sepenuhnya menunjukan objektif sebab tidak selalu konsep pembangunan nasional itu diposisikan sebagai kebijakan yang merusak tata ekonomi dunia. Sebaiknya, bahwa konsep pembangunan nasional di sebuah negara jika negara tersebut adalah negara yang aktif dalam kerja sama internasional maka akan menjadi pendorong bagi terwujudkan keadilan global karena masing-masing negara bersinergi, saling memahami dan saling menghargai arah pembangunanya masing-masing, termasuk independesi suatu negara untuk membangun sistem politiknya sendiri yang khas. Apabila ini terjadi justru Wallestein tentang gagasannya terkait teori sistem dunia yang dicarikan dengan adanya flisibilisan dan memungkinkan tergesernya negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran bisa menjadi realitas baru. Dengan demikian, sistem politik khas sebuah negara yang mendorong konsep pembangunan nasional dalam posisinya dalam teori sistem dunia bisa menjadi faktor politik bagi penguatan bergesernya posisi negar pinggiran menjadi negara semi pinggiran.

F. Pengaruh Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia telah mampu memberikan penjelasan keberhasilan membangun ekonomi pada negara pinggiran dan semi pinggiran. Kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Negara sosiallisnya kemudian menerima dan masuk kedalam pasar kapitalis dunia adalah Tiongkok, khususnya ketika priode pengintegrasian kembali *(penelitian cho dalam Suarsono dan so, 1991).*

Perspfetif So dan Cho tersebut (1991) melakukan semacam analisis dunia secara global, berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi, dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh menjadi dibolehkannya kepemilikan barang sebanyak-banyaknya bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya mengubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun

bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan masyarakat kapitalis, bentuk negara dari sistem politik egara yang berada dalam 'perangkek' kapitalisme dan liberalisme baru. Pada titik ini tidak sedikit suatu negara dikendalikan secara politik oleh negara lain karena ketergantungannya ekonomi negara lain. Seringkali sebab utamanya negara yang dependent (bergantung) tersebut karena tidak memiliki sistem politik yang kokoh atau dengan bahasa lain tidak memiliki kedaulatan politik sekaligus minus kedaulatan ekonomi.

G. Keterkaitan Dampak Sistem Dunia dan Kecenderungan Sistem Politik Negara

Waleestein dalam *Word-system An Introduction (2004)* berpendapat bahwa pembangunan atau keterbelekangan dari suatu wilayah geografis tertuntut tidak dapat dianalisis tanpa meletakan wilayah geografis tersebut dalam konteks apa yang ia sebut sebagai irama siklus dan kecenderungan perputaran ekonomi dunia secara keseluruhan. Penjelasan perangkat irama siklus dalam sistem ekonomi
dunia (Suarsono, perbuahan sosial dan pembangunan, 2006) dapat di cermati padanarasi berikut.

1. Daerah Sentral

Secara umum, fase penurunan sistem ekonomi dunia memberikan pengaruh yang sama untk semua wilayah. Dengan adanya penurunan dalam permintaan dan keuntungan, untuk mempertahankan tingkat laba yang telah dicapai, tersedia dua pilihan kebijaksanaan ekonomi (pengulangan biaya dan perluasan bangsa pasar). Fase penurunan konsentrasi modal. Kolonialisme merupakan cara lain, yang lebih bersifat politik yang dapat dilakukan negara sentral untukk melaksanakan konsetrasi modal. Pada episode neokolonialisme saat ini, sentral menjadi imperatif cenderung memiliki pengaruh besar terhadap seluruh sistem di suatu negara baik sistem ekonomi maupun sistem politiknya.

2. Wilayah Pinggiran

Negara pinggiran yang lebih bergantung pada industri bahan makanan pokok pernah merespons krisis abad ke17 dengan berbagai alternatif kebijakan ekonomi yang tersedia, antara lain dengan

kebijakan penekanan biaya khusus, biaya produksi, penjelasan negara pinggiran Eropa Timur (kaitan antara biaya produksi dan hasil produksi, hasil produksi dan bangsa pasar). Pada posisi wilayah pinggiran ini, ketergantungan pada biaya produksi dan bangsa pasar sering kali ditemukan dalam negara sentral. Dalam posisi yang lemah ini sistem ekonomi dan politiknya akan mudah dikendalikan negara sentral melalui pendekatan kebergantungan pada investasi negara sentral. Pada titik ini bahwa sistem politik bisa dirancang atau di intervasi langsung oleh negara sentral melalui proses pengulasi yang seolah demokratif. Proses amandemen UUD 1945 dan akhirnya sejumlah regulasi saat dan pasca reformasi 1998 di Indonesia adalah fakta politik yang sulit menghindari hipotensi tersebut.

3. Wilayah Semi Pinggiran

Perbedaan wilayah negara semi pinggiran berdasarkan proses lahirnya ada 2 kategori. Contoh negara semi pinggiran kategori pertama (Polandia dan Portugis) dan kategori (Swedia) menurut Wallenstein, negara semi pinggiran memiliki dua karakteristik pokok, pertama negara tersebut memiliki posisi tawar menawar (Bargaining position) perdangangan yang berdagang dengan memiliki oleh negara pimggiran. Kedua, negara semi pinggiran memiliki kepentingan langsung untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negri. Campuran tangan politik di dalam kepentingan ekonomis ini terlihat jelas dari berbagai usaha yang dilakukan oleh negara semi pinggiran ketika mereka mencapai posisi tersebut dari posisi yang sebelumnya dimiliki sebagai negara pinggiran, atau usaha mempertahankan posisi mereka sebagai negara semi pinggiran, dan usaha penguatan yang mereka lakukan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi sebagai negara sentral.

Menurut Bergeseun dan Schoenenberg (1982;1986), kebanyakan studi tentang kalonialisme dibuat dengan hanya satu titik tolak, yakni dari susdut pandang negara sentral saja atau dari sudut pandang nengara pinggiran saja. Tujuan hasil kajian Bergeseun dan Schoenenberg adalah mencoba menjelaskan kolonialisme sebagai salah satu bentuk dinamika kolektif yang khas dari tata ekonomi kapitalis dunia, dan mengiring analisis kolonialisme pada tataran analisis yang lebih tinggi dan abstrak dari sekedar tingkat nasional.

Dengan memberi ruang analisis dari kehadiran negara semi pinggiran menurut penulis bisa memberi ruang kemungkinan bagi negara-negara pinggiran bergerak menjadi negara semi pinggiran yang jauh lebih terlihat memiliki semacam semangat equality (kesejajaran)sebagai negara yang memiliki kedaulatan baik dibidang ekonomi maupun dibidang politik meski dalam banyak negara sentral. Artinya, negara yang semi pinggiran adalah proses menjadi negara yang secara politik bisa memungkinkan memiliki kedaulatan politik maupun ekonomi.

BAB 2. PENDEKATAN SISTEM POLITIK

A. Pendekatan dalam Sistem Politik

Pendekatan dalam Sistem PolitikTata cara sistem politik berperan krusial bagi struktur politik, sama misalnya kegunaannya yg berperan menjadi semacam proses buat menjalankan institusi & kebijakan pemerintah yg efektif pada masyarakat. Proses yg bisa dikatakan relatif panjang ini sinkron menggunakan panduan negara bahwa sistem politik yg berlaku dalam masa kini adalah revisi & perubahan atas sistem yg pernah terdapat & akan terdapat. Sistem politik ini berpengaruh dalam sistem sosial yg terdapat sebagai akibatnya membangun sistem sosial yg akbar dalam sebuah negara. Talcott Parsons menyebutkan bahwa setiap bagian menurut sistem sosial ini mempunyai fungsi-fungsi nya sendiri menurut division of labor atau pembagian kerja & bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara bergabung & melalui pertukaran-pertukaran anatara bagiannya sebagai akibatnya bisa membentuk suatu ekuilibrium buat mempertahankan eksistensi sistem tersebut.

Almond dan Powell mengatakan: “Memahami dan memvisualisasikan sistem politik dapat dibagi menjadi tiga bagian.

1. Pendekatan konstitusional tradisional/hukum

Leo Strauss dan John Hallowell mengutip pandangan tradisional, pendekatan sistem politik, yang menilai kekuasaan, lembaga negara, lembaga publik, dan keyakinan politik sebagai dasar analisis mereka. Kedua tokoh ini tidak membenarkan sudut pandang tindakan, karena mereka menggunakan alasan yang terlalu kuat dan tidak konsisten dengan penggunaan nilai-nilai yang tidak menjawab pertanyaan tentang sistem politik mana yang terbaik dan bentuk apa yang diperjuangkan orang. untuk mencapai. Kedua aktivis tersebut menilai perilaku mereka tidak mudah masuk ke dalam politik dan tidak memperhatikan situasi sosial saat ini. Kajian ini memberikan indikasi normatif tentang apa yang perlu dilakukan tanpa menyikapi kondisi sistem politik saat ini. Dengan demikian, teori atau pandangan tradisional ini mengkaji masa lalu daripada apa yang terjadi dalam sistem sekarang, mempolitisasi aturan atau acuan etika, serta filosofi politik, meskipun pandangan tersebut merupakan prasyarat tinggi

untuk nilai baik dan buruk dalam masyarakat. Metode tradisional ini memiliki evaluasi sebagai berikut:

a. Cakupan relatif dari sistem politik sempit dan menggunakan istilah lain yang lebih baik didefinisikan dalam hal aturan resmi pemerintah.
b. ideologi dan forum. Ini berfokus pada struktur politik, kekuasaan dan keyakinan politik.
c. Menurut nilai-nilai masyarakat, adat dan tradisi, atau pragmatis dan amal. mengacu pada filsafat.
d. Mewakili ilmu terapan.
e. Konsep pluralisme didefinisikan oleh sejarah dan norma-norma konstitusi atau hukum sejarah. Analisis selanjutnya adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach)

Sikap perilaku mulai berkembang di Amerika Serikat pada 1950-an setelah Perang Dunia II. Pendekatan ini, karena sifat naratif ilmu politik, dianggap tidak cukup karena tidak sesuai dengan penggunaan fenomena, dan kemampuan ilmuwan politik untuk mengungkapkan fenomena politik di pemerintahan AS dipertanyakan. Oleh karena itu, pendekatan ini menghadirkan fenomena tersebut sebagai titik tolak penelitian. Pendekatan ini juga ada karena didikte oleh sistem analisis perilaku atau sistem analisis perilaku. Di satu sisi, penelitian ini didasarkan pada pernyataan, sikap, dan perilaku individu, organisasi, dan forum pemerintah saat ini.

Mekanisme analisis dari pendekatan ini mewakili aktivitas dan struktur forum resmi nasional dan publik, baik secara empiris maupun saat ini. kondisi. Penelitian yang digunakan oleh para ilmuwan perilaku sangat tidak konsisten dengan kaum tradisionalis yang mencoba menjelaskan politik menggunakan ideologi dan filosofi.

Behaviorisme dalam politik berusaha menghilangkan intuisi. Beberapa menggambarkan behaviorisme sebagai bisnis penerapan metode ilmiah untuk perilaku manusia. Behaviorisme berfokus pada saran dan masalah sederhana. Pengetahuan dan kebenaran tidak dikejar dengan sendirinya, tetapi pengetahuan dimaknai sebagai nilai instrumental daripada nilai intrinsik.

3. Pendekatan Pascaperilaku (post behavioralis)

Teori ini beropini bahwa insan merupakan makhluk yg kreatif. Pendekatan ini hadir menjadi reaksi terhadap pendekatan behavioralism lantaran dari pendekatan ini, pendekatan konduite kerap kali nir memperhatikan nilai manusiawi, & kurang memperhatikan tujuan ke depan & khayalan yg dibutuhkan buat memecahkan perseteruan sosial politik yg wajib segera diselesaikan.

Pendekatan pascaperilaku mempunyai prinsip-prinsip utama, yaitu:

a. Pendekatan pascaperilaku penekanan dalam hal yg bersifat proaktif, kreatif, memiliki tujuan, & khayalan.
b. Pendekatan ini bertujuan buat mengganti pendidikan & metode penelitian ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yg eksakta, memakai metode kuantitatif, & penekanan penelitian ilmu politik dalam nilai.
c. Penelitian lebih mengutamakan yg bersifat saling berkaitan berdasarkan dalam penelitian yg bersifat cermat.
d. Dengan adanya pendekatan ini diharapakan ilmu politik nir kehilangan hubungan menggunakan empiris & informasi sosial.

B. Pendekatan Fungsional Struktural

Pendekatan ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia yang lebih luas. Oleh karena itu, sistem politik juga termasuk dalam subsistem sistem kehidupan manusia. Sistem fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dimulai dengan empat set instruksi fungsional yang disebut skema AGIL.Skema AGIL menjelaskan bahwa suatu fungsi adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Berdasarkan hal tersebut, Parsons meyakini skema AGIL-nya, yang kemudian menjadi ciri dari suatu sistem, yaitu adaptation, pencapaian tujuan (Goal), integrasi (integrasi), dan pelestarian pola (latensi). Keempat kalimat ini perlu diikuti agar sistem tetap berjalan.

a. Adaptation: Suatu sistem harus mampu menangani situasi internal dan eksternal. Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Goal: Sistem harus memiliki tujuan dan dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan itu, terutama tujuan utama.
c. Integrasi: Sistem membutuhkan kemampuan untuk mengkoordinasikan dan memelihara hubungan antara elemen-elemennya, bagian-bagiannya. Selain itu, Anda harus dapat menyesuaikan dan mengelola fungsi A, G, dan L.
d. Latensi: Implikasi dari pemeliharaan pola adalah: Sistem harus mampu memelihara, meningkatkan, dan memperbarui motivasi individu dan pola budaya.

Parsons menggunakan konsep AGIL untuk menggambarkan cara teori beroperasi di semua tingkatan, yaitu:

a. Sistem AGIL melibatkan sistem perilaku dan kepribadian yang bekerja sama untuk menyesuaikan dan mengubah dunia luar untuk mencapai tujuan sistem.
b. Sistem sosial bertanggung jawab untuk mengintegrasikan orang ke dalam komunitas dan meninjau aspek-aspek masyarakat yang menjadi bagiannya.

Suatu sistem yang dibangun di atas fondasi yang kuat dari adaptasi, tujuan, integrasi dan pemeliharaan dapat membentuk sistem budaya, sistem sosial, sistem perilaku, dan sistem kepribadian, dan kemudian pada beberapa tahap menjadi politik yang unik. Negara dan negara dengan mendorong kekuatan sistem sosial yang berubah menjadi sistem.Kemampuan sistem politik untuk beradaptasi, serta tujuannya, kemampuan untuk bersatu dan bergerak, dan kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri, semuanya merupakan faktor penting dalam ketahanannya.

1. Sistem Tindakan

Parsons melihat tingkat analisis sosial terintegrasi ke dalam sistem baik dari segi tingkat analisisnya maupun hubungannya dengan tingkat analisis lainnya. Tingkat yang lebih rendah harus memenuhi persyaratan tinggi dan diinvestasikan dengan penuh semangat untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi mengawasi tingkat di bawah mereka sesuai dengan hierarki mereka.Hirarki terendah adalah lingkungan fisik dan organik, yang meliputi unsur-unsur tubuh manusia, anatomi, dan fisiologi yang memiliki sifat non-simbolis.Ada hierarki di tingkat

yang lebih tinggi, yang merupakan realitas pamungkas, apalagi Ubedilah Badrun mengutip kritik terhadap sistem politik Indonesia dan solusi sistem politik yang efektif. fungsi struktural dengan menguraikan beberapa konsep sebagai berikut:

a. Sistem memiliki potensi untuk memelihara keteraturan dan saling bergantung dengan elemen-elemennya. Potensi ini memungkinkan sistem untuk perlahan-lahan bergerak menuju keseimbangan dari waktu ke waktu.
b. Dalam proses perubahan, sistem akan bergerak secara proporsional dengan perubahan tersebut.
c. Sifat unsur-unsur dalam suatu sistem mempengaruhi sifat unsur-unsur dalam sistem lain.
d. Sistem mempertahankan batasan dengan lingkungannya.
e. Mengalokasikan dan mengintegrasikan sumber daya merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam suatu sistem.

Menurut Badrun, sistem politik Indonesia cacat karena Parsons tidak menganalisis ranah politik secara mendalam. Namun, terlepas dari kekurangan ini, sistem sosial dan sistem politik bekerja sama untuk menghasilkan sistem fungsional.

2. Sistem Sosial

Konsep sistem sosial Parsons dapat dipahami pada tataran makro, yaitu interaksi antara ego individu dan alter ego. Dalam studinya, Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut.Sebuah sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individu yang berinteraksi satu sama lain dalam keadaan yang setidaknya memiliki aspek ekologis atau fisik, aktor termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan, yang sikapnya terhadap situasi mereka ditentukan dan dimediasi dalam hal interaksi bersama yang terstruktur secara budaya. sistem simbol (Parsons, 1951).

Isu utama yang dikaji dalam sistem sosial ini adalah aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan budaya. Dalam mempelajari sistem sosial, Parsons terutama memperhatikan elemen struktural dari sistem tersebut. Tetapi yang lebih penting, dalam sistem sosialnya Parsons juga seorang strukturalis, dan dia juga merumuskan persyaratan fungsional untuk sistem sosial, antara lain.

a. Sistem sosial harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkannya berfungsi secara harmonis dengan sistem lain.
b. Sistem sosial harus dapat mengandalkan sistem lain untuk memberikan dukungan.
c. Dukungan ini harus mampu memenuhi kebutuhan para pelaku sistem sosial secara signifikan.
d. Sistem sosial harus mampu menciptakan tingkat partisipasi dari anggotanya yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
e. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang menimbulkan gangguan atau merugikan.
f. Kerusakan yang disebabkan oleh konflik harus dicegah.

Selain kondisi tersebut, sistem sosial memiliki keterbatasan. Dalam The Heroes of Modern Sociology, Rahmad (2008), mengutip Timashef dan Theodorson (1976), “menjelaskan secara khusus keterbatasan sistem sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem sosial - jaringan hubungan antara subjek dan interaksi.
b. Sistem sosial menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mengoordinasikan perilaku individu dalam berbagai situasi.
c. Visi kepemilikan dan tujuan aktor berasal dari keyakinan, norma, dan nilai yang terorganisir dalam harapan peran.
d. Aktor memposisikan dirinya bukan sebagai individu, tetapi sebagai peran sosial yang memberikan perilaku yang sesuai dan terkait dengan peran sosial lainnya.

Ubedilah Badrun mengkritik sistem politik Indonesia dan menyimpulkan bahwa baik batas sistem sosial yang dikemukakan oleh Parsons maupun batas sistem sosial yang dijelaskan oleh Timashef dan Theodorson dapat digunakan sebagai contoh batas sistem politik dengan persyaratan tertentu. perubahan pada elemen tersebut. ".

C. Analisis sistem politik oleh David Easton

Untuk sistem politik, pandangan David Easton (1953) tidak boleh diabaikan. Easton adalah sarjana pertama yang menggambarkan ruang lingkup pendekatan sistematis untuk politik. Gunakan pendekatan konstruktif saat meninjau analisis Anda. Konsepsi umum kehidupan politiknya berupa sistem tindakan yang

terintegrasi dengan lingkungan, yang menunjukkan adanya sistem lain selain sistem politik. Karena berpikir tentang sistem politik terkait erat dengan disiplin ilmu lain, mudah untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja jika dibandingkan dengan tubuh manusia.

Tubuh manusia merupakan kesatuan dari beberapa sistem yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Contoh: Kulit untuk disentuh, kaki untuk berjalan, tangan untuk disentuh, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, rasa. Meskipun bagian-bagian tubuh ini berbeda dan memiliki fungsi yang tepat, ini tidak berarti bahwa mereka bebas untuk melakukan fungsi sesuka hati atau sesuka hati. Bagaimanapun juga, komunikasi dan koordinasi diperlukan agar setiap bagian tubuh dapat berfungsi secara bersama-sama dan tanpa membingungkan bagian lainnya dan pada akhirnya membentuk satu kesatuan dalam suatu sistem yang baik. Tanpa komunikasi dan koordinasi, sistem dapat lumpuh dan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, yang dapat berujung pada kematian.

Dalam bukunya Indonesia's Political System: A Theoretical and Empirical Understanding, Beddy Iriavan mencoba memaparkan pandangan Easton terhadap hipotesis yang mendasari pemikiran Easton dalam studi sistem politik. Asumsi yang dia gunakan adalah:

a. Sains membutuhkan struktur yang sistematis untuk mengumpulkan fakta dan data yang ada.
b. Seorang ilmuwan politik harus mempertimbangkan sistem politik secara keseluruhan, bukan sebagai bagian atau elemen individu.
c. Penelitian sistem politik mengatur data menjadi dua bagian: data psikologis dan data situasional. Data psikologis meliputi karakteristik pribadi dan alasan partisipasi politik. Data kontekstual terdiri dari semua tindakan dan aktivitas yang terjadi di bawah pengaruh lingkungan. Dampak lingkungan tersebut berasal dari faktor lingkungan, khususnya lingkungan fisik (topografi, geografi), lingkungan organik non-manusia (flora dan fauna) dan lingkungan sosial (manusia, perilaku dan tanggapan).
d. Keberadaan sistem politik harus dilihat dari posisi yang tidak seimbang.

Dari asumsi Easton, McNay menyimpulkan bahwa arah analisis Easton adalah sebagai berikut. Pertama-tama, Easton memiliki keinginan untuk secara bertahap membentuk sistem politik yang nyata. Kedua, kami mengembangkan konsep dan teori yang dapat membahas fenomena sistem politik sehingga dapat dijelaskan. Ketiga, mengidentifikasi institusi atau institusi mana yang dapat memberikan nilai kepada masyarakat. Keempat, karena sistem politik merupakan pandangan politik yang utuh dan menyeluruh, tidak mungkin untuk mengkajinya secara rinci. Kelima, penelitian tentang sistem politik harus memperhitungkan berbagai pengaruh lingkungan. Ini berarti mempelajari keadaan psikologis masyarakat dan dampak komunitas internasional saat ini terhadap sistem politik. Keenam, ilmuwan yang mempelajari dan mempelajari sistem politik harus yakin bahwa sistem politik yang mereka gunakan tidak seimbang atau unbalanced. Melalui paradigma ini, fungsi sistem politik adalah membuktikan eksistensinya dan memperoleh dukungan.

Menurut David Easton, “setidaknya ada tiga isu mendasar yang diperhatikan ketika membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). Pertama, sebuah sistem dicirikan oleh adanya saling ketergantungan antara unit-unit yang dirasakan di dalamnya, yang menunjukkan kompatibilitas. Kedua, sistem harus netral atau bebas dari pengaruh ideologis. Ketiga, sistem berarti dua hal: kovarians dan saling ketergantungan antara unit-unit yang membentuk sistem. Mengganti salah satu unit ini dapat memengaruhi unit lain dalam sistem.

Menurut Easton, “sistem politik berbeda dari sistem lain karena mereka mendefinisikan politik itu sendiri. Politik adalah serangkaian perjuangan individu atau kolektif untuk pengembangan nilai-nilai sosial. Sistem politik adalah sistem interaktif semua kelompok masyarakat dengan partai-partai yang terhubung dan dilaksanakan. Oleh karena itu, penciptaan divisi yang dilindungi dan mengikat yang membedakan sistem politik dari sistem lain. Dengan demikian, ada tiga prinsip utama untuk memaknai suatu sistem politik ke dalam sistem politik. (1) sistem politik menetapkan nilai, (2) pengangkatannya bersifat otoriter, dan (3) kewenangan sistem

politik mengikat masyarakat secara keseluruhan. Ketiga prinsip ini menekankan bahwa sistem politik menentukan alokasi nilai melalui, misalnya, politik. Tujuan dari nilai-nilai ini ditentukan oleh badan hukum. Melalui kekuatan legitimasi ini, politik dapat menghubungkan masyarakat secara keseluruhan".

Easton Mas'ud dan MacAndrews (1991: 5-6) menjelaskan setidaknya empat karakteristik yang membedakan satu sistem politik dari sistem lainnya, yaitu:

a. Deskripsi identifikasi berarti bahwa suatu sistem politik harus dapat mengidentifikasi dan mendefinisikannya untuk membedakannya dari sistem lain. Untuk mendefinisikannya dengan benar, dua hal harus dipertimbangkan: bagian-bagian dari sistem politik dan batas-batas sistem politik. Seperti perbatasan lainnya antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.
b. Kedatangan dan keluar (input dan output). Mengetahui bahwa suatu sistem politik benar dan berfungsi dengan benar memerlukan pengenalan harian yang terencana dan tetap, karena tanpanya sistem politik tidak akan berjalan. Keuntungan politik, seperti dukungan atau tuntutan dari suatu komunitas melalui mekanisme tertentu. Tetapi yang lebih penting, produk sangat penting karena tanpa mereka Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan datang dari sistem politik.
c. Membedakan sistem politik. Dengan kata lain, itu adalah pemisahan kekuasaan dalam sistem tenaga. Diferensiasi politik berarti menunjukkan bahwa setiap elemen suprastruktur dan substruktur sistem politik memiliki tugas dan kekuasaan yang berbeda tergantung pada fungsi pembagian kerja.
d. Integrasi sistem. Penyatuan sistem politik umum adalah upaya untuk mengatur dan memperkuat kekuatan dan tindakan sistem politik. Integrasi semacam itu hanya mungkin terjadi jika sistem politik menyadari setiap elemen untuk mempertahankan keberadaannya dan mengambil keputusan dengan otoritas. Oleh karena itu, ketika kekuatan politik ini menjadi keputusan politik, semua kelas dan partai akan berfungsi secara terintegrasi

D. Input, Output, dan Rata-rata dalam Sistem Politik

1. Kedatangan dan keluar (input dan output)

Suatu kebutuhan atau syarat merupakan hal yang esensial bagi terselenggaranya suatu sistem politik, seperti suatu gagasan atau gagasan yang disampaikan kepada pemerintah oleh masyarakat. Menurut Easton, klaim adalah ekspresi pendapat atas suatu hal tertentu yang memerlukan pengalihan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab. Namun, pendapatan juga termasuk mendukung atau mendorong mereka yang terlibat dalam sistem politik. Dukungan dan kebutuhan ini berjalan beriringan dan tidak saling mendominasi, dan pemantauan harus dilakukan berdasarkan permintaan. Ini berarti bahwa permintaan kami untuk dukungan pemerintah juga harus dapat dikontrol dan masuk akal. Bantuan yang diberikan akan diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan bantuan yang diberikan harus sejalan dengan ideologi dan nasionalisme. Dukungan politik ini bisa bersifat terbuka atau tertutup. Dukungan terbuka adalah bentuk tindakan yang memberikan dukungan yang jelas dan tidak ambigu, sedangkan dukungan tertutup adalah bentuk tindakan dan emosi yang tertutup.

Amelia Haryanti dan Julia Pugilestari menjelaskan dalam bukunya The Indonesia Political System bahwa "dukungan sistem politik sangat penting untuk membangun sistem politik dalam suatu masyarakat." Dukungan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan pendidikan, pengetahuan, layanan dan kebutuhan lainnya. Namun, dalam praktiknya, beberapa persyaratan ini mudah dipenuhi, sementara yang lain sulit dipenuhi. Persyaratan sulit untuk dipenuhi karena instruksi yang diberikan tidak memadai dan sulit untuk diproses untuk membawa sistem ke produksi.

Pengaduan atau rujukan harus dilakukan secara efektif. Karena keterbatasan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka, mereka dapat mengambil bentuk sistem demokrasi melalui individu, kelompok atau organisasi, sehingga mereka harus dikomunikasikan melalui sarana dan metode yang tepat, termasuk saluran komunikasi dan penyampaian politik. mereka kepada pemerintah.

Tuntutan dan dukungan ini diperlukan untuk mengubah interaksi relasi untuk mengubah sistem politik yang ada. Secara khusus, ada beberapa cara untuk mengoptimalkan proses dukungan

ini.

a. Area pendukung
b. Komunitas Politik

Upaya untuk menegaskan kekuasaan membentuk kelompok yang disebut komunikasi politik, yang juga dapat digunakan oleh komunitas politik untuk menyelesaikan perselisihan. cara

c. Rezim

Rezim adalah bentuk dukungan luas terhadap aturan yang ditujukan untuk mendamaikan beragam kebutuhan komunitas anggota sistem dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari dampak dukungan terhadap organisasi politik.

d. Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam memecahkan masalah dalam sistem. Pemerintah harus mampu menengahi dan mendukung pihak-pihak yang berperang. Mekanisme dukungan:

e. Tata Cara Dukungan

Besarnya dukungan atau dorongan dari anggota sistem dapat menjadi sumber kekuatan yang menerjemahkan kebutuhan menjadi solusi untuk menjaga sistem tetap stabil dan stabil. Mekanisme distribusi dukungan terdiri dari tiga bagian:

f. Keluaran (output)

Emansipasi atau kebijakan politik merupakan bentuk hasil dalam sistem politik. Menjaga hubungan baik antar anggota sistem politik merupakan salah satu cara untuk mendukung kepatuhan. Namun, dalam praktiknya tidak semua persyaratan dapat dipenuhi dan pada akhirnya hanya yang paling diperlukan yang akan berfungsi dan keputusan akhir akan berlaku.

g. Sosialisasi

Proses pengenalan suatu sistem politik ke dalam masyarakat secara turun-temurun merupakan semacam dukungan cadangan bagi keberadaan dan kelestarian sistem politik tersebut. Persepsi tentang adanya sistem politik dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat dan asimilasi nilai-nilai politik. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk mensosialisasikan sistem politik agar dapat berfungsi secara efektif.

h. Pengaplikasian

Pelepasan atau kebijakan politik adalah suatu bentuk hasil dalam sistem politik sebagai akibat dari permintaan atau permintaan dari anggota kelompok dalam sistem internal dan eksternal. Lebih banyak dukungan diharapkan setelah versi memenuhi persyaratan. Namun, jika produk tidak memenuhi persyaratan, ada risiko bahwa basis dukungan akan terkikis dan sistem tidak seimbang. Interaksi produk sistem politik tercermin dalam reaksi pihak peminta. Input dari sistem politik Indonesia melakukan fungsi-fungsi berikut:

- Sosialisasi politik
- Rekrutmen untuk pekerjaan politik
- Ekspresi minat

Ekspresi minat adalah upaya yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengejar dan memuaskan kepentingan mereka sendiri. - Integrasi kepentingan

- Agregasi kepentingan

Fungsi ini merupakan proses penggabungan beberapa kepentingan yang diwakili oleh kelompok kepentingan, lembaga atau organisasi lain. Kombinasi kepentingan ini biasanya muncul dalam musyawarah legislatif.

- Komunikasi politik

Komunikasi politik menitikberatkan pada cara-cara sistematis dalam menyebarluaskan nilai dan informasi melalui berbagai struktur dalam sistem politik.

i. Lingkungan Sistem Politik

Dalam sistem politik, pengertian lingkungan meliputi lingkungan sosial dan lingkungan di luar lingkungan sosial. Lingkungan internal mencakup semua elemen masyarakat yang merupakan bagian dari sistem politiknya, yang terdiri dari sikap, perilaku, gagasan, kepribadian, struktur sosial, ekonomi, dan budaya inklusif. Selain itu, lingkungan nonsosial mencakup masyarakat internasional di luar sistem politik sebagai komponen fungsional. Keadaan eksternal tersebut mempengaruhi sistem politik berupa tekanan terhadap keberadaannya. Easton mengatakan: “Ada empat definisi lingkungan sosial, yaitu:

a. Ekosistem mewakili semua lingkungan fisik dan kondisi organik non-manusia dari kehidupan manusia. Ini adalah lingkungan fisik, seperti iklim, topografi, perbatasan, dan wilayah. Pada saat yang sama, kondisi tidak manusiawi termasuk sumber daya alam, flora dan fauna. Hasil dari keputusan politik atau sistem politik harus fokus pada ekosistem itu.
b. Sistem biologis. Sistem ini berfokus pada struktur biologis masyarakat manusia yang mempengaruhi pembentukan tindakan politik tertentu. Awalnya, susunan biologis seseorang juga mempengaruhi perkembangan perilaku tertentu. Namun, kebenaran prediksi ini membutuhkan penelitian dan penelitian lebih lanjut.
c. Sistem kepribadian. Sistem ini diyakini dapat membantu menentukan motivasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Studi yang sering dilakukan memeriksa sifat negara dan dampaknya terhadap urusan nasional.
d. Sistem sosial. David Easton terus membagi sistem sosial menjadi beberapa sistem: sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Jika berbicara tentang budaya politik, orang biasanya terbagi menjadi beberapa tipe, dari yang acuh tak acuh terhadap politik hingga yang sangat aktif dalam politik".

Sistem non-politik juga dibagi menjadi tiga bagian: sistem politik internasional, sistem lingkungan internasional, dan sistem sosial internasional. Sistem politik internasional dibagi lagi menjadi sistem politik individu, seperti ASEAN, PBB dan NATO, dan sistem politik kolektif individu. Sistem politik internasional ini mempengaruhi sistem politik nasional masing-masing negara.

Amelia Haryanti dan Julia Pugilestari menjelaskan dalam bukunya The Indonesian Political System bahwa "faktor lingkungan global juga mempengaruhi sistem politik nasional". Misalnya, kenaikan harga minyak dunia akan mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Fluktuasi harga ini harus dibarengi dengan kebijakan sistem politik pemerintah yang baru. Begitu juga jika harga minyak dunia turun, maka harga akan turun.

Menurut David Easton, “Dukungan suatu sistem politik dapat menjadi sumber kekuatan yang melaluinya sistem itu beroperasi. Oleh karena itu, sistem politik merupakan proses yang utuh dimana pendapatan diubah menjadi pengeluaran, dan dalam proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan dan instansi pemerintah. Selain itu, analisis sistem politik ini dapat dibagi menjadi empat kategori.

a. Interaksi politik dalam masyarakat adalah sistem tindakan
b. Sistem politik ada dalam lingkungan fisik, sosial dan psikologis.
c. Sistem politik bersifat terbuka dalam arti tidak terlepas dari pengaruh sistem lain.
d. Karena tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sistem lain, sistem politik harus mampu merespon ancaman dan gangguan di masa depan serta beradaptasi dengan berbagai situasi.

BAB 3 FUNGSI SISTEM POLITIK

A. Pengertian Sosialisasi Politik

Menurut KBBI, sosialisasi adalah upaya mensosialisasikan sesuatu untuk diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Politik adalah pengetahuan tentang administrasi pemerintahan seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan. arti dari sosialisasi politik adalah memberikan sebuah pemahaman tentang politik dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa yang paham tentang politik.

Adapun menurut E. Greenburg (1970) sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang mana indvidu memperoleh sikap, keyakinan, nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem politik dimana ia adalah anggota dan berperan sendiri sebagai warga negara dalam sistem politik tersebut.

Menurut Rahman, A. (2017) Sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang menerima pengalaman politik dan pendidikan politik dari orang lain ataupun kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk mengembangkan sikap dan arah mengenai kebijakan tertentu dalam perjalanan kehidupan politik.

Dapat diketahui bahwa sosialisasi politik adalah mensosisalisasikan atau menggambarkan dunia politik atau sistem pemerintahan dengan berbagai sarana yang ada dilingkungan sekitar seperti pada keluarga, sekolah dengan menyediakan sarana pembelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), teman sebaya, dan media sosial.

Fungsi sosialisasi politik adalah untuk mengajarkan negara agar masyarakat memahami politik, pemerintahan, dan bagaimana pemerintah menjalankan politik. Sosialisasi politik berkontribusi pada pengakuan dan pemahaman politik golongan tua dan muda sebagai ahli waris negara. Hal ini memungkinkan seseorang untuk keikutsertaan aktif pada sistem publik.

Sosialisasi politik berfungsi sebagai pengenalan sistem politik masa lalu dan masa kini. Memahami sosialisasi politik menemukan aplikasi dalam mempertahankan sistem politik negara yang ada. Kesadaran dan pemahaman politik diperlukan untuk perubahan demi masa depan negara yang lebih baik, bahkan demi terciptanya sistem

politik baru.

Menurut Angara, S. (2013), tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari tiga dimensi:

1. Aspek Psikologis,

Aspek psikologis dapat difokuskan kepada pembentukan opini politik dan kepribadian politik, yang biasanya merupakan faktor psikologis.

2. Aspek Ideologis

Dimensi ini adalah proses menerima ideologi yang menjadi model kepercayaan. Simbol politik dimaknai sebagai simbol keyakinan politik. Pada tataran ini, ideologi menjadi nilai yang menjadi pedoman perilaku kehidupan masyarakat, yang akhirnya mempengaruhi modern tidak menjadi penting.

3. Aspek Normative

Standar normatif mencerminkan keadaan dimana sikap mental dan pola pikir diintegrasikan ke dalam sistem normatif umum. Aturan mencerminkan aturan yang ditetapkan oleh negara dan aturan yang dibentuk oleh masyarakat.

Sarana untuk mesosialisasikan politik tentunya dimulai dengan yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, tempat bekerja, dan media sosial dengan sarana tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang dunia poltik.

Hal ini menandakan bahwa sosialisasi politik dapat berlangsung dengan adanya kepercayaan yang dibangun anatara kita dan sang pemberi informasi tersebut yaitu dengan keluarga, teman sebaya atau sekolah, namun sebagai penerima informasi harus juga memastikan kebenaran informasi tersebut.

B. Fungsi Rekrutmen Politik

Perekrutan adalah pemilihan untuk menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan pekerjaan. Politik, di sisi lain, hanya menyangkut warga negara, sedangkan rekrutmen politik adalah pemilihan orang untuk melaksanakan urusan nasional. Perekrutan sendiri biasanya dilakukan oleh partai politik atau organisasi yang sudah terbiasa menangani perekrutan tersebut.

Rekrutmen politik adalah proses mencari anggota baru partai politik dan melibatkan orang-orang berbakat dalam proses politik.

Bergabung dengan partai politik tidak hanya mencakup inisiasi pejabat baru, tetapi juga rekrutmen dan pengangkatan pegawai negeri (Fitriyah, F. (2020). Anggota kelompok karyawan adalah mereka yang memegang jabatan publik atau memiliki keterampilan atau bakat yang diperlukan untuk posisi tersebut.

Dalam pengertian ini, rekrutmen politik adalah proses di mana sistem politik menjalankan aktivitas politik dan melibatkan warga negara dalam pemilihan umum, rapat umum, dan pemilihan atau pencalonan mereka untuk melayani atas nama mereka. Dalam hal ini, partai melalui proses mencari anggota parlemen baru yang cakap dan melibatkan mereka dalam proses politik. Elit sosial adalah alat yang digunakan untuk membujuk orang untuk bergabung dengan partai politik.

Partai yang berbeda pastinya memiliki model perekrutan yang berbeda. Model penerimaan anggota partai sesuai dengan sistem politik. Di Indonesia, kandidat yang dicalonkan oleh partai politik dipilih dengan cermat oleh pejabat pemerintah dan diangkat sebagai politisi dengan hak pilih universal. Seleksi ini diawali dengan kajian khusus (litus) tentang loyalitas terhadap ideologi nasional. Tujuan perekrutan politisi ini adalah untuk mencari orang-orang untuk yang dapat bekerja sebagai pejabat di tingkat pusat baik itu dipedesaan atau dipusat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Menurut Sihombing, S. S. (2021) dalam tahapan rekrutmen politik dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan terbuka dan tahapan tertutup yaitu:

1. Terbuka

Pada tahap rekrutmen terbuka semua warga negara mendapatkan kesempatan untuk menempatkan posisi-posisi yang ada dalam Lembaga pemeritahan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti pada kemampuan kecakapan, umur dan keadaan fisik.

Persaingan untuk mendapatkan posisi biasanya sangat ketat, dan ujiannya biasanya melibatkan nilai-nilai moral yang melekat padanya, termasuk pendapat atau kesetiaan kepada masyarakat. Keunggulan pemilu terbuka adalah adanya mekanisme demokrasi,

persaingan politik yang kuat, kemampuan untuk memilih pemimpin yang benar-benar terpilih dari masyarakat, dan tingkat kepemimpinan yang tinggi.

2. Tertutup

Orang tidak memiliki banyak kesempatan untuk memegang jabatan politik karena hanya orang-orang tertentu yang dapat memegang posisi tersebut. Dalam pencalonan tertutup, masyarakat tidak mengetahui persyaratan calon. Pemilihan tertutup ini mencegah publik menilai kecocokan kandidat untuk suatu posisi. Oleh karena itu, cara ini dinilai kurang kompetitif karena seleksinya tertutup.

C. Fungsi Komunikasi Politik

Pengertian komunikasi secara bahasa atau secara umum adalah kegiatan untuk salaing memahami atau saling megerti ata suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada lawan bicaranya atau komunikan atau dapat dikatakan sebagai proses tukar menukar pesan dari indvidu kepada individu lainnya kepada suatu kelompok kecil (*small group*) ataupun kepada kelompok besar (*large group*) (Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017).

Sedangkan politik adalah segala sesuatu yang berurusan dengan negara dan masyarakat, atau dapat juga diartikan sebagai adminitrasi suatu pemerintahan yang berkaitan dengan sitem pemerintahan atau dasar-dasar pemerintahan.

Komunikasi politik menurut pakar politik Mawadi Rauf, dalam Pureklolon, T. P. (2016) ialah Komunikasi politik Peran negara, pemerintah dan komunikator dari sudut pandang aktor politik merupakan topik penelitian dalam ilmu politik. Komunikasi politik dipandang dalam dua dimensi: komunikasi politik digunakan aktivitas politik dan komunikasi politik sebagai aktivitas ilmiah. Komunikasi sebagai aktivitas politik adalah ketika suatu pihak mengirimkan pesan bermotif politik kepada pihak lain.

Komunikasi politik mengacu dalam cara pada mana suatu sistem mengkomunikasikan nilai & berita melalui aneka macam struktur yg membangun sistem politik. Komunikasi politik terjadi waktu terdapat kebijakan pemerintah antara pemerintah & rakyat yg lalu wajib dikomunikasikan atau disosialisasikan pada publik guna

memperoleh dukungan publik. Hal ini bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media. Pers jua berperan krusial pada komunikasi politik, dimana mempunyai bunyi & mengekspresikan ilham-ilham politik pada pembangunan & acara kerja pemerintah.

Perilaku tadi bersifat realitas lantaran diwujudkan pada kehidupan konkret pada kehidupan sosial. Pada waktu yg sama, komunikasi politik menjadi aktivitas ilmiah menduga komunikasi politik menjadi keliru satu aktivitas politik menurut sistem politik.

Fungsi atas komunikasi politik tentunya adalah sebagai alat komunikasi antara petugas pemerintahan dengan masyarakat salah satu fungsi dari komunikasi politik adalah untuk menyampaikan informasi tentang politik tentang apa saja yang sedang terjadi didalam politik tersebut.

Lalu sebagai mempertahankan nilai yang sudah biasanya terjadi pada lingkup masyarakat, lalu juga sebagai sosialisasi politik, agar masyarakat paham tentang sistem perintahan yang ada di Indonesia perlu untuk mengadakan sosialisasi politik, lalu dapat menambah partisispasi masyarakat dalam bidang politik.

Adapun manfaat dari mehami komunikasi politik ialah:

1. Pahamnya tentang fungsi dari komunikasi politik untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bangsa.
2. Memberikan Pendidikan tentang kewarganegaraan yang cerdas bagi pelaku dan masyarakat.
3. Meningkatkan partisapi publik dalam politik dan meningkatkan pertumbuhan demokrasi.
4. Untuk menghindari terjadinya seperti manipulasi atau kebohongan public, rpmosi berita, penggunaan public untuk tujuan tertentu.
5. Menumbuhkan pemikiran kritis bagi masyarakat.
6. Untuk menjaga ke stabilan politik.

Dapat juga sebagai meningkatkan rasa kebangsaan seperti ketika partisipasi meningkat dan warga negara terlibat dalam proses politik, kewarganegaraan secara otomatis meningkat. Misalnya, mereka yang mengikuti pemilu ikut serta dalam kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang baik, merasa telah memenuhinya, dan ikut menentukan arah negara.

Menurut TANJUNGPINANG, P. H. K., & FAJRI, J. (2016) terdapat unsur-unsur dari komunikasi politik yaitu:

1. Komunikator politik
   Komunikasi politik tidak terbatas pada partai politik, legislatif, dan eksekutif. Komunikator politik adalah orang yang dapat memberikan informasi penting tentang isu-isu penting pemerintahan, seperti presiden, MPR, DPR, gubernur/walikota, atau kelompok besar lainnya yang memiliki pengaruh khusus terhadap pemerintahan.
2. Pesan Politik
   Pesan politik adalah pernyataan tertulis atau tertulis, lisan atau non-verbal, yang bersifat politik. Pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, spanduk, iklan politik, artikel, surat kabar, radio, televisi, internet.

3. Saluran atau Media Politik
   Saluran atau media politik yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi politik, seperti media cetak, surat kabar, majalah dan buku, serta media elektronik seperti film, berita, radio, video dan spanduk, baliho, pamflet, poster.
4. Maksud atau Tujuan Politik
   Sasaran atau sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat. Ketika pemilihan umum berlangsung, kami ingin seluruh rakyat Indonesia dapat memilih calon yang dicalonkan untuk pemilihan umum.
5. Efek dari Komunikasi Politik
   Efek yang didapatkan seperti pahamnya masyarakat tentang sistem pemerintahan dan partai politik. Ataupun efek yang didapat dari komunikasi politik adalah seperti dukungan atau aktifnya masyarakat dalam hal politik.

Namun menurut Sumarto AP., dalam Anggara, S. (2013). Yang menyatakan bahwa komunikasi politik memliki dua bagian yaitu:

1. Dalam unsur komunikasi yang termasuk dalam jenis suprastruktur, unsur ini termasuk kedalam bagian dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Tiga bagian golongan tersebut terdiri dari:

a. Golongan politik
b. Golongan Prajurit
c. Melawan birokrasi politik
d. Tim professional

2. Unsur kedua dari komunikasi politik ialah komunikasi politik dalam institusi infrastruktur politik. Bagian ini dikelompokkan kedalam kelompok yang berbeda yaitu:
   a. Partai politik
   b. Kelompok kepentingan
   c. Alat komunikasi politik
   d. Sekelompok wartawan
   e. Sekelompok siswa
   f. Politikus
   g. Fungsi dari komunikasi politik.

D. Fungsi Stratifikasi Sosial

Dalam sosiologi, suatu sistem kelas sosial disebut juga stratifikasi sosial (social stratification). Kata layer berasal dari kata layers (lapisan berlapis-lapis). Stratifikasi sosial ialah pembeda antara masyarakat dalam bentuk tingkatan kelas (hierarki). Bentuk kelas adalah kelas atas dari kelas bawah, yang didasarkan pada pembagian hak, tugas, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial yang tidak merata dan pengaruh di antara anggota masyarakat (Prosodjo, N. W. dan Pandjaitan, NK: 2015).

Menurut definisi lain, stratifikasi sosial adalah suatu konsep yang merepresentasikan perbedaan progresif atau pengelompokan kelompok sosial (masyarakat). Misalnya, sebuah komunitas memiliki lantai atas, tengah, dan bawah. Tentu saja, perbedaan ini didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap paling berharga dan pada dimensi sosial-ekonomi, politik, hukum, dan lainnya dari kelompok sosial (Singh, D.S.:2010).

Stratifikasi sosial adalah fenomena universal. Artinya, adanya stratifikasi dalam masyarakat selalu menemukan kelas sosial itu. Bukti adanya kelas sosial dalam masyarakat biasa. Kualifikasi untuk kekayaan dan pekerjaan adalah salah satu standar paling sederhana, tetapi itu juga berarti bahwa tidak ada masyarakat tanpa kelas dalam masyarakat kita. Distribusi stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak

merata, karena munculnya stratifikasi sosial terjadi pada sebagian kecil dari apa yang berharga dalam masyarakat.

Menurut Hariyono, M. P. (2011) dalam stratifikasi social juga terdapat tolak ukur dalam memposisikan seseorang dalam sebuah kelompok, ukuran atau kriteria yang digunakan dalam golongan anggota-anggota masyarakat tersebut adalah:

1. Harta benda, yaitu salah satu symbol atau juga tempat tinggal, pakaian, kendaraan dn kebiasaan untuk kehidupan sehari-hari
2. Kekuasaan, seseorang yang memiliki wewenng dalam menempati lapisan tertinggi masyarakat.
3. Kehormatan, biasanya terdapat pada masyarkat yang masih tradisional yaitu dujukan kepada orang yang pernah berjasa atau orang yang dianggap paling dihormati dan disegani.
4. Ilmu pengethuan, yaitu seseorang yang memiliki gelar akademik atau menggunakan ilmu pengetahuan sebagai indicator.

Terjadinya stratifikasi social bisa disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Stratifikasi sosial terjadi dengan sendirinya karena:
   a. Umur: tua dan muda
   b. Kepandaian: orang pinta dan kurang pintar
   c. Orang terdekat: orang yang mempunyai hubungan lebih dekat akan mendapat warisan lebih banyak
   d. Gender: laki-laki dan Wanita
2. Stratifikasi sosial terjadi dengan sengaja:
   e. Pekerjaan: atasan dan bawahan
   f. Ekonomi: penguas dan kepemilikan materi.

E. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya untuk secara sadar menyeimbangkan budaya politik masyarakat Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan fakta tersebut, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk membuka proses pendidikan kewarganegaraan kepada publik melalui sistem politik Indonesia. Pendidikan politik penting bagi bangsa, memahami pentingnya dunia politik dan menjaga stabilitas politik bangsa. (Sutrismanda D.:2019).

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses memperoleh nilai politik, baik disengaja, formal maupun informal. Hal ini terjadi secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan politik untuk partisipasi politik dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban.

Dalam pengertian Pendidikan belajar adalah proses yang akan dilakukan sepanjang hidup. Yang artinya Pendidikan politik akan terus dilakukan agar masyarkat dapat terus meningkatkan pemahamannya tentang dunia politik yang terus berkembang. Pendidikan politik meliputi semua kalangan, tua dan muda. Yang artinya Pendidikan politik harus dimulai sejak dini. (Hartono, R.: 2016).

Dijelaskan bahwa pendidikan politik juga dikenal sebagai pendidikan atau bangunan politik. Ini juga disebut pelatihan politisi yang sadar akan posisi politik mereka di masyarakat. Disebut juga Bindung (Pendidikan kepada diri sendiri) karena dibentuk dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menjadi seorang politikus. Pendidikan politik (political education) adalah mutlak, dan pendidikan politik membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Setelah dibebaskan, partai politik juga mengapresiasi pendidikan politik dan memiliki kader senior independen negara (Sutrisman, D. :2019).

Pendidikan dan politik merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi dan dapat dilihat bahwa dalam perkembangan sistem pendidikan, warga negara harus selalu berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa politik yang berlangsung pada saat itu. Oleh karena itu, semua masalah dalam dunia pendidikan menjadi masalah politik ketika negara turun tangan untuk menyelesaikannya.

Tujuan utama pendidikan politik adalah agar setiap orang mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang ada dalam sistem politik saat ini, yang darinya pendidikan politik diharapkan di atas segalanya. Kedua, tidak semua orang tahu tentang sistem politik saat ini. Karena pengetahuan politik ini berfungsi untuk menyadarkan semua warga negara pada pemahaman tentang sistem negara, untuk bertanggung jawab atas dunia politik dan untuk mengubah pendapat untuk meningkatkan partisipasi.

Adapun bentuk dan tujuan dari Pendidikan politik ini, bentuk dan Pendidikan politik menurut Kavang (1998) dalam (Rahman, A.:2018) terbagi menjadi dua jenis Pendidikan yaitu:

1. Bentuk dan proses Pendidikan politik yang bersifat tersembunyi atau aktivitas berlansungnya kedalam Lembaga-lembaga social yang non politis seperti lingkup keluarga, lingkungan social, dan keagmanaan, atau disekolah maupun kampus.
2. Bentuk dan proses Pendidikan politik yang secara terbuka dimana aktivitas tersebut berlansung didalam Lembaga politis tersebut (termasuk pemilu dan sebagainya).

Terdapat pula Pendidikan politik yang mengikuti jumlah peserta, dengan membedakan antara umum dan terbatas. Pendidikan dalam bentuk umum akan diadakan bila peserta yang mengikutinya tidak dibatasi jumlah peserta yang mengikuti namun untuk Pendidikan politik terbatas hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu saja.

Tujuan dari diadakannya Pendidikan politik ini adalah menurut Khoiron (1999, hal 11) dalam Sutrisman, D. (2019, hal 24) menyebutkan secara terperinci yaitu:

1. Menyediakan perluasan wawasan, keperluan dan komitmen instansi pemerintah di tingkat nasional untuk mendukung proses dan tujuan organisasi masyarakat sipil.
2. Memperdalam pemahaman dasar, filosofi, sejarah, politik, ekonomi, demokrasi dan konstitusi Indonesia dan seterusnya.
3. Pengembangan ketakwaan dan kerukunan yang merupakan prinsip atau nilai-nilai rasional atau fundamental yang dituangkan dalam dokumen-dokumen seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Sumpah Pemuda, menjadi sarana keberhasilan dengan mempersatukan bangsa.
4. Berkontribusi pada pemahaman pesan dasar lembaga dan nilai-nilai dalam masyarakat sipil untuk memperjuangkan kehidupan yang adil, setara, dan baik sebagai bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Rahman, A. (2018), bentuk-bentuk pendidikan politik yang dapat digunakan adalah:

1. Suatu bentuk publikasi massa yang membentuk opini publik, biasanya berupa buku, majalah, atau surat kabar. membaca materi semacam itu.
2. Acara TV atau radio dan film (media audio-visual)
3. Lembaga Pendidikan formal ataupun informal, dapat juga seperti asosiasi yang terdapat didalam masyarakat seperti masjid yang biasa menyampaikan khutbah.

Namun terdapat pula Pendidikan politik yang ditujukan kepada Pendidikan politik kader dan pengembangan untuk organisasi partai yang dijelaskan oleh Anggara, S. (2013) yaitu:

Pendidikan politik yang ditujukan untuk kader bersifat untuk meningkatkan kualitas calon yang akan dijadikan pemimpin partai atau organisasi selanjutnya. Pendidikan partai lebih focus kepada pengembangan program partai itu sendiri. Pendidikannya lebih berkarater untuk memelihara mekanisme demokrasi yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Pelatihan Pertama
   a. Memahami sifat organisasi.
   b. Meransang loyalitas kepada organisasi.
   c. Menguatkan janji.

   Pelatihan pertama biasanya diperuntukkan untuk kader pemula
2. Pelatihan Kedua
   a. Menemukan ide berdasarkan ideologi partai.
   b. Mengembangkan kreativitas untuk memajukan partai.
   c. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi.

   Pelatihan kedua biasaya diperuntukkan untuk kader madya
3. Pelatihan Ketiga
   a. Pelatiah sumber daya manusia dalam organisasi denan keterampilan konseptual.
   b. Belajar berfikir sistematis dan strategis.
   c. Kembangkan kemampuan untuk menganalisis peristiwa politik dan cara mengatasinya.
   d. Mendidik agar berfikir futuristik.

   Pelatihan ketiga biasanya ditujukkan untuk calon politisi.

Pembentukan partai politik dapat menjadi pedoman bagi

kepentingan nasional. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana dan mekanisme untuk mencapai tujuan negara. Karakter dan keberadaan moral setiap elemen dari keselurahan sistem menunjuk bahwa pengetahuan politik dapat menggambungkan upaya untuk mendukung satu sistem politik dengan sistem lainnya.

F. Fungsi Input Sistem Politik

Sistem politik harus dapat diaskes oleh sistem politik sebagai sumber energi. perbedaan kebutuhan, perawatan Kesehatan, tingkat Pendidikan, dan pelayanan. Jadi kita perlu memenuhi sistem. Tidak semua persyaratan mudah untuk dipenuhi dan dipenuhi, tetapi ada juga persyaratan yang membutuhkan sumber daya dan perhatian khusus.

Dari semua persyaratan tersebut, seringkali ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini karena persyaratan ini tidak dikonfigurasi dengan benar dan tidak akan pernah mencapai sistem. Yang penting dipelajari adalah peran komunikasi politik, termasuk subjek yang membuat tuntutan tersebut, dengan memasuki sistem politik melalui transmisi tuntutan.

Dalam hal ini, pembuatan kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan dukungan, serta berbagai dampak lingkungan, dan pengembangan kebijakan adalah transformasi peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang atau peraturan wajib lainnya menjadi kebijakan umum. , DPRD dan DPD sebagai lembaga yang mewakili ambisi daerah.

Menurut dukungan mempunyai dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Bidang Dukungan Politik

Dalam wilayah dukungan politik terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Komunitas Politik

   Dukungan terhadap komunitas politim dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perbedaan yang terdapat dalam penuatan keputusan yang mengikat. Dukungan tersebut didapat melalui kesadaran dan kesatuan nasional.

b. Rezim

   Rezim adalah dukungan dari beberapa aturan dasar yang mengatur atau menyeimbangkan perilaku yang berbeda dari

anggota organisasi untuk memecahkan masalah yang muncul sebagai akibat dari asosiasi.

c. Pemerintah

Misi pemerintah adalah membantu pemerintah menyelesaikan masalah atau konflik antar anggota sistem.

2. Mekanisme Dukungan

Sistem politik tidak cukup menyerap energi dari anggota sistem politik itu sendiri. Hasilnya jelas dilihat sebagai keputusan politik atau politik. Keputusan untuk memenuhi kebutuhan anggota sistem adalah salah satu cara yang mudah untuk tetap berhubungan dengan tim dukungan Anda.

Pada prinsipnya, lebih baik organisasi memiliki lebih banyak persyaratan, tetapi tidak semua persyaratan terpenuhi, jadi setidaknya pertimbangkan kebutuhan kelompok penting sebelum mempertimbangkannya. Sosialisasi (proses mendidik orang dari generasi ke generasi dalam suatu sistem politik) adalah cara untuk menciptakan sumber daya atau stok yang luas.

Jika proses pembelajaran berlangsung terus menerus. Sosialisasi politik tampaknya efektif jika dapat menciptakan atau mentransmisikan nilai-nilai dan kebijakan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ciri-ciri penerapan sistem politik:

1. Sosialisasi Politik
2. Pemilihan Politisi
3. Ekspresi Ketertarikan
4. Invasi Kepentingan
5. Komunikasi Politik

G. Fungsi Output Sistem Politik

Fungsi output itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Fungsi keputusan politik

Fungsi keputusan politik terbentuk di bawah pengaruh lingkungan yang berbeda berdasarkan permintaan dan dukungan dalam pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang mengikat dengan kebijakan umum.

2. Fungsi penegakan kebijakan

Implementasi kebijakan tersebut merupakan penerapan common law pada tataran warga negara melalui peraturan-peraturan lainnya. Apa artinya ini, lembaga ini berhasil menerapkan aturan sosial. Kebijakan ini dibuat oleh agen administrasi yang mencakup pemerintah pusat di wilayah ini.

3. Fungsi peninjauan kebijakan

Pengawasan politik adalah pengawasan terhadap supremasi hukum di antara warga negara. Dalam pengawasan ini, banyak badan khusus yang melakukan pengawasan ini. Fungsi pembuatan kebijakan dilakukan oleh yudikatif: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan yudikatif.

Proses fungsional bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan harus ditinjau. Sebelum kebijakan dapat dikembangkan, pemerintah atau individu atau kelompok masyarakat harus memutuskan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Proses politik dimulai ketika kepentingan ini diungkapkan atau diartikulasikan.

Penerapan kebijakan dalam hal ini adalah penerapan hukum umum dan peraturan lainnya di tingkat perdata. Dalam melakukannya, Badan akan mengambil tindakan administratif untuk menerapkan aturan yang diadopsi untuk kepentingan umum. Fungsi penegakan kebijakan dilakukan oleh lembaga penegak, dari lembaga pemerintah pusat hingga kota.

Politik hukum dalam hal ini merupakan pengawasan terhadap penegakan hukum antar warga negara, dalam hal ini terdapat badan khusus yang mengawasi dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pengembangan dan penegakan peraturan.

Masukan tersebut kemudian digabungkan menjadi beberapa alternatif keputusan agar dapat melakukan tindakan yang diambil secara efektif. Semua ini dilakukan oleh partai politik seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Selanjutnya, lembaga legislatif dan administratif menyusun pedoman, kemudian birokrat menerapkan pedoman, membuat keputusan kebijakan tentang penyimpangan yang terjadi, dan mendapat umpan balik, yang diolah menjadi kebijakan baru.

Jika input tidak seimbang dalam pembuatan kebijakan, maka

output pun tidak akan berjalan. Banyak orang yang akan menentang kebijakan, tetapi lingkungan pun dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, yang akhirnya hanya dapat mengharapkan umpan balik untuk terus meningkatkannya. Pembuatan dan implementasi kebijakan, apakah liberal, komunis atau demokratis, sangat bergantung pada di mana sistem itu berada. Sistem pemerintahan yang berbeda memiliki bagian pembuatan kebijakan dan implementasi yang berbeda.

BAB 4. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA

A. Masa Pra-Kolonial (Masa Kerajaan)

Sebelum penguasa Barat datang ke Indonesia, system pemerintahan yang dibentuk bersifat monarki. Penguasaan negara sepenuhnya ada ditangan pribumi, raja, pangeran, sultan bahkan silsilah kerluarganya itu sendiri. Gaya politik yang digunakan tentunya kerajaan sesuai dengan bentuk negaranya. Keterlibatan militer didalamnya pun sangat kuat, dimana pada masa itu masih dalam kondisi peperangan yang sangat hebat. Penyaluran suatu tuntutan dianggap rendah dan terpenuhi. Sedangkan analisis kestabilitasan pada saat itu ada waktunya stabil ketika tidak adanya peperangan, dan ada waktunya tidak stabil ketika peperangan berlangsung. Perkembangan suatu nilai yang hidup dan efektif sesuai dengan penguasaan saat itu. Dan aparat negara memiliki sifat loyal yang sangat tinggi kepada negara.

1. Jaringan Perdagangan

Sebelum Eropa Barat masuk dan menguasai wilayah Nusantara, maka pada saat itu belum ada negara Indonesia. Megahnya Nusantara meliputi pulau-pulau yang dikelilingi indahnya daratan yang pada mulanya dipegang oleh raja-raja, terkadang hidup beriringan dengan aman dan terdapat juga saat dimana mereka saling berselisih.

Sejak awal mula sejarah di Asia, terdapat aliran perdagangan yang telah tumbuh di Nusantara. Dengan adanya estimasi perdagangan tersebut merupakan suatu asset kekuasaan yang paling penting bagi seorang raja untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kekuatan besar dan sangat berpengaruh bagi mereka. Akan tetapi, semakin luasnya jaringan perdagangan tersebut dapat mengakibatkan banyaknya pengaruh negara asing yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya suatu penjajahan.

Sejarah Indonesia sebelum 500 Masehi agak terlambat, karena sedikit sumber-sumber sejarah yang tertulis pada masa itu. Disebabkan separuh tulisan sejarah dibuat dari bahan yang tidak kokoh, yang pada akhirnya para sejarawan berfokus pada peninggalan pada batu-batu dan bekas candi terdahulu untuk menganalisis sejarah

lama Nusantara. Hal ini berakibatkan pada struktur politik pada zaman lalu dalam menerima Informasi berupa bangunan candi sebagai budaya luhur yang diberikan kepada elit penguasa.

Sejarah Nusantara perpusat pada pulau Jawa dan Sumatera, karena Nusantara bagian Timur seperti selat Malaka sedikit aktivitas dalam bidang ekonominya dan letaknya yang jauh dari jalur perdangan inti. Maka dari itu kerajaan dan kekaisaran pada bagian Timur tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan politik.

2. Kedatangan Islam di Indonesia

Islam dianggap sangat berpengaruh bagi kalangan elit Majapahit pada saat itu. Diperkirakan Islam masuk ke Asia Tenggara bagian maritime dari awal masa Islam ketika terjadinya suatu aktivitas perdagangan orang muslim datang di Nusantara, membangun permukimann di wilayah pesisir, menikah dengan wanita sekitar, hingga dihormati karena kekayaan dari hasil perdagangan.

Pada saat itu mulailah kalangan elit local merasa tertarik dengan agama tersebut, karena melihat sebagian besar pedagang memiliki kekayaan tersendiri dan menganggap hal itu sangat berpengaruh dalam keuntungan dalam politik perdangan. Pembangunan kekaisaran Islam salah satu tahap logis berikutnya, yang mana diduga masyarakat dari raja-raja local mulai bertahap menganut agama Islam.

Pada abad ke-13 terdapat prasasti pada sebuah batu nisan yang menandakan adanya kekaisaran Islam di Sumatera sebelah utara dinamai dengan Pasaei dan Samudra. Dari wilayah tersebut melebar luas kearah Timur melalui perdagangan. Namun jauh kemungkinan jika beberapa raja Jawa dari Majapahit di wilayah Jawa Timur menganut Islam.

3. Kedatangan agama Hindu-Hudha ke Indonesia

Menurut Teori Waisya. Golongan bangsa pedagang berperan aktif menyebabkan penganut Hindu Buda di Indonesia. keterkaitan dalam perdagangan antar India dan Indoneisa berjalan sejak abad satu Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tionghoa menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya, yang awalnya pedagang India berjalan untuk melakukan dagang. Waktu itu, rute perdagangan dijalani lewat rute laut sehingga mereka menggunakan

kapal pelayaran menuju lokasi tempat perdagangan berlangsung. Hal ini mengakibatkan mereka bergantung terhadap arah angin dan cuaca alam, jika cuaca alam dan arah mata angin tanpa bersahabat sehingga mereka diam lebih lama dan menunggu kondisi yang stabil.

Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun menetap berbulan-bulan di Indonesia. Karena interaksi yang cukup lama antara pedagang India dengan penduduk pribumi secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu Budha ke masyarakat pribumi melalui berbagai cara, salah satunya seperti adanya ikatan pernikahan terhadap pribumi serta dengan melalui pernikahan tersebut mereka memberitahu budaya India yang lekat dengan agama Hindu Budha.

4. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia

Mulai tahun 1500-an Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Negara yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.

Dibandingkan dari bangs Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi nafigasi, dan perlengkapan yang paling canggih dimasanya. Untuk meminimalisir terjadinya bentrokan antara kedua bangsa tersebut, maka dibangunlah sebuah perjanjian Tordesilas yang berisi pembagian arah pelayaran yang dimana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah Timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berlayar dan berdagang ke arah Barat.

Portugis mulai ekspedisi ke arah Timur pada tahun 1487, kemudian mereka sampai ke Maluku tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore.

Sedangkan Spanyol memilai ekspedisinya ke arah Barat pada tahun 1492, kemudian mereka tiba di Filipina pada tahun 1521. Setelah itu mereka melanjutkan perjalannya ke Nusantara di Maluku

tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol menjadi sekutu untuk mengalahkan Ternate.

B. Masa Kolonial

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam begitu limpah ruah dari Sabang sampai Marauke, yang didalamnya berisi hamparan luas pulau-pulau yang dikelilingi oleh indahnya lautan. Ini menjadi salah satu incaran para kolonialisme yang berbondong-bondong untuk datang dengan alasan mencari rempah-rempah. Pada tahun 1596 kolonial Belanda akhirnya tiba di pelabuhan Banten. Akan tetapi pasukan koloni tersebut pada saat itu diusir oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan alasan mereka memiliki tatakrama yang sombong, kasar bahkan arogan terhadap pribumi. Sehingga secara terpaksa mereka meninggalkan Banten tanpa membuahkan hasil.

Tidak berhenti disitu, colonial Belanda tiba kedua kalinya di pelabuhan Banten pada tahun 1598 Mahesi dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Wijbrand Van Wairwijck demi melangsungkan misinya. Kedatangan kala itu mereka berhasil menjalankan misi nya yang dimana mereka mendapatkan rempah-rempah hasil bumi Nusantara dengan cara membeli sesuai dengan incarnya.

Belanda mendirikan kongsi dagang atau perusahaan perdagangan yang bernama VOC (Vereening Oost Indische Compaganie). Atas kesepakatan wali negara Belanda VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Yang mana VOC berjalan dari tahun 1602-1800 sebagai masa kekuasaan VOC di Indonesia.

Pada saat itu lah monopoli perdagangan pada pihak colonial Belanda dimulai. Yang mana, mereka membentuk sentra ekonomi yang kokoh dan menjalankan sebuah taktik sehingga pribumi merasa ketergantungan terhadap mereka. Pada akhirnya pribumi merasa tidak sadar jika colonial Belanda sedang menjalankan misi kekuasaannya.

Dengan ketergantungannya pribumi terhadap perdagangan belanda ini kemudian secara terus menerus berkembang di daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan ekspansi perdagangan Belanda

dengan menghasilkan rempah-rempah yang sangat melimpah melalui strageti politik yang dilakukan antara penguasa satu dengan penguasa lainnya.

Luasnya wilayah Nusantara ini mengakibatkan para Belanda membuat trik Politik Devide Et Ampera atau biasa disebut politik pecah belah. Yang mana mereka dapat dengan mudah menguasai Nusantara sehingga politik yang dirancang secara halus bisa disebarluaskan di wilayah-wilayah yang mereka anggap memiliki peran penting dalam ekspansi perdagangan oleh pihak Kolonial dengan proses pemberontakan antara penguasa satu dengan penguasa lain.

Sebelum didirikan VOC para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling beromba-lomba untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Saat itu koloni Belanda bertarung dengan pihak Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau orgainsasi perussahaan. Pemerintah belanda yakin dengan hal ini jadi senjata ampuh dari senjata militer dan ekonomi. VOC dikelola olah 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heeren Zeventien yang dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heeren Zeventien ini selain mengella VOC juga menanamkan sahamnya.Adapun tujuan utama didirikan VOC diantaranya;

a. Menghindari persaingan antar perdagangan belanda
b. Mengatasi persaingan dengan perdagangan dari Bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugis, dan Inggirs
c. Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah

Pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan diwilayah Indonesia. Akan tetapi dalam sebuah perluasan VOC bergerak layaknya suatu Negara. VOC dijadikan sebagai Wakil Pemerintahan Belanda di Indonesia.

Kemenangan VOC pada perluasan penguasaan justru mengakibatkan Hereen Zeveentien keberatan dalam mengelola VOC. Sehingga Hereen Zeveentien mengangkat Pieeter Boht menjadi Gubernur VOC pemula yang bertugas untuk merapihkan kelembagaan VOC. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur VOC pertama tersebut, salah satunya membeli sebuah tanah di

Jayakarta yang akan menjadi kota Batavia. Pada masa itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC, yang mana Batavia terdiri menjadi dua bagian, pertama disebut sebagai benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip dan tempat tinggal tentara VOC. Kedua, ialah pemukiman yangsudah ada dua abad sebelumnya.

Batavia dibangun oleh belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda, dengan kekuasaannya belanda membangun tembok pembatas yang ertujuan dengan mencegah masuknya orang-orang pribumi ke wilayah Batavia.

Setelah masa perkembanganya VOC telah banyak mengalahkan penguas pribumi, seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksan seorang penguasa Makasar yaitu Sultan Hasaudin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisikan tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahana monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar.

Adanya pembentukan VOC jelas sangat menguntungkan pihak colonial saja, akan tetapi jika dilihat dari sisi lain justru hal ini sangat merugikan pihak pribumi yang mana mereka melakukan prakteknya dengan tidak manusiawi.

Selain mengalami perkembangan yang pesat sebelumnya, tiba waktunya dimana pada tahun 1799 VOC harus gulung tikar hingga dibubarkan. Salah satu penyebab dibukarkannya itu karena terdabap pejabat VOC melakukan korupsi dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan lain dianggap kalah.

C. Demokrasi Liberal

Indonesia dan Belanda menempuh jalan Diplomasi sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah melalui jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia salah satunya ialah jalan Konverensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Adapun beberapa hasil yang didapatkan dari KMB ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), dibentuknya Uni Indonesiaa Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB,

utang Belanda dibayar oleh Indonesia, kapal untuk berperang terhadap Belanda dibawa dari perairan Nusantara, dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI.

Dari sekian banyak kebijakan KMB yang dikeluarkan, salah satu hasil konverensi meja bundar yang paling menonjol ialah perubahan bentuk negara kesatuan Indonesia menjadi Serikat atau Republika Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa itu Indonesia dibagi hingga 7 bagian, namun masa berlakunya bentuk Republik Indonesia Serikat ini bertahan sebentar, bahkan tidak sampai memasuki pergantian tahun. Karena masyarakat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini hanya taktik pihak Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. rakyat Indonesia menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi Kesatuan Indonesia. atas tuntunan rakyat ini lah pemerintah pusat pda 17 Agustuss 1950 mengubah Indonesia jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hukum yang ada pada masa itu ialah Undangg-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 50). Pada saat itu Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahannya Parlementer.

Berkembangnya demokrasi liberal di tandai dengan adanya partai politik, karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah Multi-Partai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, N U, dan PKI. Pad demokrasi liberal ini Indonesia memegang sistem pemerintahan parlementer. Parlemen ialah badan legislative atau yang sekarang dikenal ialah MPR,DPR, DPD. Ada beberapa ciri dari sistem pemerintah Parlementer, diantaranya; pertama, ketua pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sehingga presiden hanya symbol kepala atau ketua negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedua, Kabinet atau para menteri yang dipegang oleh orang di perdana menteri bertanggungjawab kepada parlement. Ketiga, Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlement dengan Mosie tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya.

Selama era Demokrasi Liberal, beberapa kali terjadi pertukaran kabinet dalam kurun waktu 9 tahun mulai dari tahun 1950

hingga 1959 Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Diantara 7 kebinet tersebut ada beberapa kabinet yang unggul, diantaranya ;

Pertama, kabinet Natsir. Masa jabatannya hanya bertahan 6 bulan saja dari tanggal 6 sepetember 1950 dan berakhir pada 20 Maret 1951. Jatuhnya kebinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan Irian bagian Barat dan adanya Mosie tidak percaya dari PNI terkait pencopotan pemerintah yang dianggap terlalu menguntungkan partai Masyumi. Akan tetapi dibalik itu terdapat program kerja kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Kedua, kabinet Sukiman. Beliau mengawali masa jabatannya pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada masa kabinet Sukiman banyak sekali terjadi masalah dalam bidang politik yang mengakibatkan kabinet ini dijatuhkan ialah penandatangan kerjasama yang dilakukan oleh menteri luar negeri ialah Ahmad Soebarjo dengan seorang duta besar Amerika dalam Undang-Undang kerjasama keamanan. Perjanjian tersebut berisikan tentang pemberikan bantuan berupa ekonomi hinggga militer dari negara AS untuk nusantara, dimana kerjasama tersebut dianggap bertolak belakang dengan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia. yang mengakibatkan kabinet Sukieman dianggap membela Blok Barat yang saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur, akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan kabinet Sukiman.

Ketiga, kabinet Wilopo. Pada 3 April 1952 memulai jabatannya sampai 30 Juli 1953 yang mana kebinet ini bertahan hanya 15 bulan lebih lama daripada kabinet kabinet sebelumnnya. Kebinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi, dan dalam kabinet ini juga dibentuk kebinet ZAKEN yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Akan tetapi, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan eksport impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Yang ujungnya kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Rawa, Sumatera Selatan, dimana pemerintah

menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereeniging dan mengarahkan polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut.

Keempat, kabinet Ali Sostramijoyo ke-I. masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini sangat berperan dalam eksistensi Indonesia di kanca Internasional yang salah satunya terlaksanakannya konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan utang Indonesia ke Belanda. Kabinet ini turun akibat dari pengangkatan TNI AD terhadap Bang-Bang Utojo sebagai kepala staf yang tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD.

Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru penggati UUSD 50 yg masih bersifat sementara. Berakhirnya kabinet ini bukan karena mengundurkan diri ataupun dibubarkan, melainkan tugasnya yang dianggap selesai.

Keenam, kabinet Ali Sastroamijo ke-II. Untuk kedua kalinya Ali S dipilih oleh presiden Soekarno sebagai perdana menteri. Masa jabatan yang dipegang ialah pada 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Beliau berkoalisi dengan partai besar seperti PNI, Masyumi dan NU, sedangakn partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada kabinet ini dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis diberbagai daerah.

Ketujuh, kabinet Djuanda. Masa jabatannya dimulai pada 9 April 1957 dan berakhir pada 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dnegan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Pada masa kabinet Djuanda. Banyak program kerja yang terrealisasikan, salah satunya berhasil menyarakan kepada dunia mengenaipenetapan batas laut Teritorial Indonesia, peristiwa ini disebut dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Sedangkan masalah dihadapi oleh kabinet Djuanda ialah adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno di Cikini tahun

1957. Dan siding dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai.

Sebelum masa kabinet Djuanda dimulai, Soekarno telah mengadakan Sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan UUD yang baru. Namun, sampai tahun 1959 Dewan Konstituantisme masih belum mengeluarkan Undang-Undang Dasar yang baru.

D. Demokrasi Terpimpin

Pada saat itu, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang pada akhirnya Soekarno menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik di Indonesia. Sehingga pada tanggal 14 bulan November tahun 1945 sistem pemerintah yang ada di Indonesia berubah dari system parlementer jadi system presidensial, sebagai usaha untuk menghilangkan kesan bahwa presiden Soekarno bukanlah actor tunggal, yang pada akhirnya posisi presiden Soekarno berubah menjadi kepala negara bukan kepala pemerintahan lagi, dan posisi kepala pemerintah diambil alih oleh Perdana Menteri, sehingga membentuk Republik Indonesia Serikat, yang didalamnya terdapat tiga Perdana Menteri ialah Sultan Syahrir, Amin Syarifudin, dan Hatta (Magenda, 2005).

Menurut salah seorang sejarawan Ahmad Sari'I Ma'arif berpendapat bahwa demokrasi terpimpin ini memiliki tujuan khusus untuk menetapkan Soekarno sebagai presiden RI, sehingga dianalogikan sebagai bapak dalam suatu keluarga dengan segala kekuasaan didalamnya. Akan tetapi terdapat kekeliruan dan mengingkari nilai-nilai demokrasi, yakni hidupnya absolutisme hingga putusnya suatu kekuasaan terhadap pemimpin.

Sekitar tahun 1950 terjadi suatu perdebatan mengenai perubahan konstitusi yang mana UUD 1945 diubah menjadi UUDS 1950. UUDS 1950 ini bertahan hanya beberapa waktu saja, sehingga diberlakukannya kembali sekitar tahun 1959 menjadi UUD 1945 lagi. Hal ini terjadi sama seperti hal nya pemberlakukan system politik UUDS 1945 pada masa demokrasi parlementer tanggal 14 November 1945.

Awal Juli 1959 Soekarno melakukan pertemuan dengan para

pemangku kepentingan seperti ketua DPR, para Mentri, pimpinan TNI, anggota dewan Nasional, dan tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah yang akan diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Setelah melakukan suatu tertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa UUD 1945 akan digunakan kembali.

5 Juli 1959 pertemuan dilanjutkan sekaligus memunculkan suatu Dekrit Presiden upaya dalam mencari jalan pintas dari kebutuhan sistem politik melalui pemetaan kepemimpinan personal yang kokoh. Yang didalamnya terdapat suatu hal mengenai pembubaran dewan konstituansi, UUD 1945 diberlakukan kembali, sehingga UUDS 1950 berhenti dibelakukan dan penataan suatu MPRS dan DPAS. Ini menjadi tanda bahwa berakhirnya Demokrasi Liberal dan mulai diberlakukan Demokrasi Terpimpin.

Pada HUT RI tahun 1959, jenderal Soekarno berpidato mengenai “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam pidatonya, jenderal Soekarno menyampaikan suatu motivasi untuk terus berrevolusi, keadilan bagi sosial, serta penyusunan ulang terhadap organisasi dan lembaga negara bagi revolusi yang terus berkaitan. Adapun pidato ini dikenal dengan nama Manipol atau Manifesto Politik. Dengan perkembangannya manipol usdek dijadikan sebagai ideology resmi pada masa demokrasi terpimpin ini dan dijadikan sebagai garis besar haluan negara.

Salah satu partai politik terbesar pada system parlementer ialah Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) yang dibubarkan pada saat itu, karena mereka dianggap memiliki keterkaitan dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sedangkan Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan mengenai NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis) dengan tujuan ingin menyatukan tiga kekuatan dibawah pimpinannnya itu. Hal ini dimanfaatkan langsung oleh partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguatkan keberadaannya dalam system politik di Indonesia. PKI sendiri telah meyakinkan presiden Soekarno bahwa mereka adalah partai pendukung utama pada kebijakan pemerintah.

Adanya gerakan yang dilaksanakan oleh PKI tanggal 30 September 1965 atau peristiwa dikenal dengan nama G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik

pada masa demokrasi terpimpin dimana kebijakan-kebijakan politik Soekarno telah membawa Indonesia mendekat ke blok Timur yaitu politik luar negeri seperti Jakarta-Peking-Pyongyang. Pasca tragedy G30S/PKI di Indonesia mengakibatkan kondisi politik yang tidak konsisten, sehingga keyakinan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Sukarno semakin rapuh.

Setelah mengetahui hal ini TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam, dimana mereka melakukan perencanaan dalam pemberantasan DN Aidit, ketua PKI dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Akan tetapi, rencana tersebut mendapat protes dari Presiden Soekarno, yang mana TNI AD diminta untuk mencabut perencanaan tersebut dan Soekarno pun meminta untuk tidak melarang hal apapun yang dilakukan oleh pihak PKI. Sehingga suasan politik pun semakin memanas antara TNI AD, tokoh-tokoh politik dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan itu segera diakhiri mengingat Indonesia saar itu sedang focus pada konfrontasi dengan Malaysia.

E. Demokrasi Pancasila

MPRS mengangkat jenderal Suharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968 dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinan ini sebagai masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru.

Melihat banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya, Soeharto memutuskan suatu tekad untuk memperbaiki sistem politik di RI dengan memfokus pada UUD 45 dan Pancasila secara keseluruhan, murni, dan konsekuwen yang selama ini dianggap masa pemerintahan sebelumnya tidak seutuhnya melaksanakan Pancasila dan UUD 45 sebagai asas hukum. Maka dari itu, dengan naiknya Soeharto sebagai presiden memiliki tujuan untuk menyusun kembali peraturan agar sistem politik di Indonesia kembali berjalan dengan stabil sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Paham demokrasi Pancasila dianggap cocok bagi kerpibadian Indonesia yang dapat dilihat melalui kehidupan sosial budaya yang ada di Indonesia sendiri, dimana hal itu dikembangkan secara aktif turun temurun sebelum negara Indonesia merdeka. Ini semua dapat kita saksikan sendiri pada kehidupan masyarakat yang masih menggunakan sistem mupakat serta silih bantu diantara mereka dalam

suatu problemalitas.

Kehidupan pada masa dekomrasi Pancasila pada hakikatnya terpampang jelas pada Pancasila ialah sila ke empat, yang berbunyi : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Ini dapat dijadikan suatu bukti adanya keterkaitan antar sila satu dengan sila yang lain.

Pada 11 Maret 1966 Jenderal Soekarno membuat konsep surat suatu perintah yang ditujukan terhadap Suharto, yang dimana perintah itu kita kenal pada istilah SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret. Supersemar ini berisikan suatu mendat kepada Soeharto selaku panglima TNI AD untuk memulikan kondisi politik dan tinggian pemerintahan agar terciptanya status damai, terkendali bahkan stabil dari kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah.

Langkah awal pertama yang gerakan oleh jenderal Suharto sesudah memegang mandat Sepersemar tersebut salah satunya ialah beliau membubarkan langsung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang berjalannya organisasi masa yang berlindung atau sejalan dengan PKI di seluruh Indonesia dan pembubaran ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

Sejak mengemban mandat Supersemar, nama Letjen Soeharto semakin dikenal banyak orang. Akan tetapi kondisi ini mengakibatkan munculnya Dualisme Kepemimpinan Nasional. Tanggal 22 Juni 1966 Sukarno berpidat berjudul “Nawaksara”. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawabana atas sikapnya dalam mengahadapi G30S//PKI, akan tetapi pidato ini ditolak oleh MPRS.

Bulan Juli awal tahun 1966, Supersemar dijadikan ketetapan MPRS, dengan demikian Sukarno tidak dapat mencabut Supersemar. Dan secara hukum kedudukan Soeharto sejajar dengan Soekarno sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS unruk membuat kabinat baru yang diberi nama kabinet Ampera, yang kemudian diresmikan pada 8 Juli 1966 yang berisikan suatu tugas utama dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.

Untuk membersihkan sisa-sisa PKI, jenderal Soeharto membentuk suatu kelompok Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Kertiban (Kopkamtib) sehingga dapat dengan mudah dalam menormalkan dan mengembangkan kembali system politik yang

sempat tidak baik.

Dalam kebijakan-kebijakan yang ada pada periode ini melalui stabilitas politik yang mana dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI. Selain berperan dalam bidang militer juga berperan dalam bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan Dwifungsi ABRI ialah dengan memasukan anggota ABRI dalam keanggotaan DPR-MPR, dan juga banyak yang menjadi pejabal sipil. Hal ini menunjukan adanya dominasi militer dalam kehidupansosial politik di Indonesia pada masa ini. ABRI juga memiliki janji setia terhadap Pancasila dan UUD 45, dikarenakan angkatan bersenjata tersebut sangat berperan penting demi persatuan bangsa.

F. Masa Reformasi

Telah kita ketahui bahwa sistem politik di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai konflik yang terus bergulir. Seharusnya konflik yang ada dapat dikendalikan di negara Indonesia yang memegang sistem demokrasi.

Setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kepresidenan dan menjabat selama 32 tahun maka pada saat itu Indonesia memulai tahap baru yaitu tahap era Reformasi. Adanya erareformasi ini sebagai harapan besar dalam kemajuan bangsa dalam pemetaan hukum hingga peraturan yang disesuaikan kembali pada Pancasila dan UUD 45. Dan juga besar harapan bangsa adanya masa ini dapat memperbaiki dan menata ulang konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sempat terjadi pada sistem politik di Indonesia sebelumnya.

Pada masa awal Reformasi pemerintahan Indonesia telah melewati beberapa periode, diantaranya ; peride pemerintahan BJ Habibie, periode pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, periode pemerintahan Megawati, hingga periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

21 Mei 1998 merupakan suatu kejadian dimana mundurnya Suharto sekaligus dilantiknya BJ Habibie menjadi presiden selanjutnya. Setelah dilantik, presiden Bj Habibi menyampaikan pidato pertamanya beliau menyerukan suatu tekadnya untuk menjalankan masa reformasi. Dimana dalam pidato tersebut berisi tentang visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntunan

repormasi yang tepat dan cepat.

Presiden BJ Habibie menyusun kebijakan yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan pada pada tanggal 22 bulan Mei tahun 1998. Kebijakan ini dikeluarkan oleh BJ Habibie salah satunya dalam bidang Politik, yang mana beliau berupaya merubah budaya politik yang mewarisi pemerintahan sebelumnya. Pada periode pemerintahan BJ Habibie ini terdapat kejadian besar yang terdapat dimasa ini, ialah dilaksanaknnya Referendum di Timor Timur. Referendum ialah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang memengaruhi suatu negara. Telah kita ketahui bahwa sejak masa orde baru Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang pada akhirnya presiden BJ Habibie memutuskan untuk melakukan Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999, dengan tujuan untuk meyakinkan apakah masyarakat Timor Timur mengambil pilihan kemerdekaan atau otonomi. Hasil referendum diumumkan oleh PBB pada tanggal 1999 yang beisikan bahwa 78.5% rakyat Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia dan resmi lepas dari Indonesia pada 19 Oktober 1999.

Tahap memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 1999 dilaksanakan pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR. Abdurrahman Wahid berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi presiden Indonesia yang ke-4 pada 20 Oktober 1999. Adapun beberapa kebijakan pada masa ini dalam bidang hukum dan pemerintahannya, yang mana beliau menyampaikan kebijakan berupa membubarkan departemen pemerangan serta departemen sosial untuk mencapai tujuan pelurusan struktur suatu pemerintahan. Lalu kebijakan Amandemen Undang-Undang Dasar 45, pada 18 Agustus 2000. Amanndemen reformasi bersangkutan dengan suatu susunan pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten. Diakhir periodenya, pada 21 Juli 2001 atas permintaan DPR, MPR melaksanakan sidang istimewa yang dipegang oleh Amin Rais dengan agenda untuk memberhentikan Gus Dur sebagai presiden RI. Disisi lain Gus Dur menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan kepresidenannya. Merasa dirinya terancam maka Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden 22 Juli 2001, akan tetapi dekrit tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian

singkatnya Gus Dur dianggap melanggar otoritas negara dikarenakan tidak menghadiri bahkan menolak untuk berpidato mengenai pertanggung jawabannya pada sidang istimewa MPR, sehingga Gus Dur diberhentikan oleh MPR sebagai presiden Indonesia

Setelah Gus Dur berhenti menjadi presiden, maka Megawati Soekarno Puteri diangkat sebagai presiden Indonesia ke lima pada 23 Juli 2001. Salah satu dari sekian banyak nya kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Megawati ialah dibidang Ekonomi, yang mana krisis ekonomi di Indonesia dari tahun 1998 tidak teratasi oleh dua pemerintahan sekaligus. Presiden Megawati dianggap berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia hal ini dibuktikan dengan tingkat harga dan suatu nilai tukar rupiah pada dollar Amerika Serikat rendah sehingga dapat berdampak pada stabilnya harga barang-barang.

Presiden Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudoyono pada pemilu tahun 2004, sehingga Susilo Bambang Yudoyono diangkat menjadi presiden Indonesia ke enam dan juga presiden pertama yang dipilih langsung oleng rakyat Indonesia. Pada priode pemerintaha SBY membentuk kabinet yaitu "Kabinet Indonesia Bersatu", yang mana ada beberapa kebijakan pada periode ini. Salah satu kebijakannya yaitu dalam bidang Politik yang berisikan membentuk sekertariat gabungan (Setgab) untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan memiliki visi misi yang sejalan. Memperluas wewenang pemerintahan daerah dan mengurangi wewenang pemerintahan pusat secara seimbang. Mengupayakan birokrasi yang transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden SBY selalu berusaha dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu mengembangakan komunikasi yang baik bersama rakyat Indonesia dengan cara memfaatkan media sosial yang telah ada.

BAB 5. BUDAYA POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola dalam suatu perilaku yang mana terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat yang bernegara. Baik itu berupa penyelenggaraan administrasi negara, mengenai adat istiadat, hukum, politik dalam system pemerintahan, begitu juga dengan norma norma yang berlaku di dalam kebiasaan yang tetap ditaati dan dijaga secara turun menurun oleh masyarat di setiap hariya. Pengertian budaya politik juga dapat diartikan sebagai system yang memiliki nilai nilai kebersamaan dalam suatu masyarakat yang mana mereka sadar akan pentingnya sebuah kebersamaan untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat kolektif sebagai penentu kebijakan public dalam mengambil keputusan untuk seluruh masyarakat.

Sudah banyak sekali yang mengkaji tentang ilmu politik, baik dari kalangan mahasiswa, sarjana, dosen bahkan ahli politik. Mereka berulangkali mengkaji, memahami dan menelaah ilmu politik yang telah melahirkan banyak pengertian yang telah memaparkan ap aitu budaya politik juga bukti sebuah hasil dari penelaahan para ahli sehingga terlihat ada beberapa perbedaan konsep. Meskipun sempat memiliki beberapa konsep, perbedaan konsep tersebut masih dalam satu komponen keilmuan yang sama berdasarkan rambu rambu pemahaman yang sama. Berikut pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiardjo, Politik adalah usaha untuk menentukan pelaturan peraturan yang dapat diterima baik oleh Sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.

Makaberdasarkan pemaparan ahli politik diatas, dapat ditarik beberapa simpulan konseptual tentang budaya politi, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahwasannya konsep dari budaya politik secara keseluruhan mengacu pada titik penekanan perilaku nonaktual seperti, nilai-nilai pada kepercayaan, norma-norma juga orientasi sikap pada masyarakat.
b. Hal hal yang di tekankan pada orientasi pengamalan budaya politik ini adalah system politik, yang artinya di dalamnya tentu membicarakan banyak hal mengenai budaya politik yang tidak

pernah bisa dilepaskan dari pembicaraan system politik, karena budaya politik sendiri muncul dari system politik yang ada di masyarat.

c. Budaya politik sendiri merupakan deksripsi dari masyarakat tataran massif budaya politik, yang mana komponen di dalamnya muncul atas kebiasaan masyarakat sendiri dalam budaya poitik yang bersifat negara atau wilayah bukan tentang hal individual.

Maka dari itu ketika kita faham akan pengertian budaya politik, setidaknya kita akan memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni :

a. Setiap warga negara akan menjalankan sitem politik yang mana secara tidak langsung akan mengikuti tuntutan budaya politik yang ada seperti pada system tanggapan public, dukungan, serta beberapa orientasi terhadapsistem budaya poitik di masyarakat.
b. Masyarakat akan mengerti bahwasannya akan selalu ada hubungan anatara budaya politik dan system politik, yang mana hubungan tersebut akan melahirkan beberapa pergeseran politik.

B. Tipe Tipe Budaya Politik

Budaya politik Indonesia termasuk kedalam tingkatan yang antusias di masyarakat karena didukung dengan system demokrasi yang di terapkan di Indonesia menyebabkan partisipasi masyarakat pada system politik di Indonesia sangat besar, juga memang peranan demokrasi yang hapir komponen keseluruhan melibatkan masyarakat di berbagai beahan daerah yang menjadi pusat demokrasi.

Oleh karena itu ada beberapa tipe tipe dari budaya politk, diantaranya:

1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang mana tingkat partisipasi masyarakatnya sangat rendah. Budaya politik dapat dikatakan rendah atau disebut parokial apabila dalam suatu mayarakat orientasi mereka sangat rendah terhadap partisipan kepada sitem politik yang mana ada empat unsur yang tidak terpenuhi atau sangat minim, atau bisa dikatakan mendekati nol. Tipe politik ini umumnya terdapat pada masyarakt suku Afrika

atau masyarakat pedaaman yang ada di Indonesia. Tidak ada lapisan masyarakat yang merangkum dalam system politik atau bidaya politik yang menjadi peran khusus, karena mungkin keterbatasan akses yang ada di pedalaman juga sangat minimnya pemahaman mereka terhadap budaya politik. Seperti kepala suku, kiai dan laian lain, mereka mayoritas tidak begitu partisipan terhadap budaya politik yang ada.

2. Budaya politik kaula (subjek) budaya politik ynag masyaraatnya sudah relative dominan ikut partisipan budaya politik, yang mana sudah cukup maju dari segi ssosial maupun ekonominya tetapi sifatnya masih pasif atau bisa berubah. Dapat dikatakan masyarakat budaya positif apabila terdapat frekuensi objektifitas yang tinggi dan maju mengenai pemahaman dan pengetahuan secara umum mengenai budaya politik maupun system politik juga mengenaai kebijakan kebijakan yang telah dibuat tetap oleh pemerintah. Namaun dalam system tatanan keorganisasian, peranan dalam pembuatan kebijakan tidak begitu diperhatiakan. Yang pada intinya pada budaya politik yang bersifat subjek ini sudah ada yang memandang proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Budaya politik partisipan, lapisan ini bisa dikatakan sebagai lapisan tingkat tinggi karena kesadaran masyarakat terhadap politik yang ada sangatlah tinggi. Masyarakatnya mampu memberikan gagasan serta opini yang aktif dan kuat arena tingkat kefahaman mereka memang sudah tidak diragukan lagi. Karena tingkat partisipan ini sudah sangat memahami system politik yang menyebabkan budaya politiknya semakin maju. Integrasi mereka terhadap system politik sangatlah memadai juga tingkat pasrtisipan mereka terhadap dunia politik sanagatlah besar. Mereka juga aktif dalam berproses dan mengikuti proses politik yang sedang berlangsung. Masyarakat pada lapisan ini cenderung diarahkan sebagai lapisan masyarakat yang mempunyai kepribadian yang aktif dalam semua dimensi politik yang ada yang menyebabkan terus berkmbangnya system politik serta teraganya budaya politik. Mereka sudah tidak gentar lagi dengan

kritikan atau evaluasi yang ada justru itu menjadi pemicu mereka untuk terus aktif daam dunia politik.

C. Sosialisasi dan Partisipasi Politik Pada Masyarakat

Sosialisasi politik merupakan proses dimana di dalamnya memberitahuakn dan memberikan pemahaman pada masyarakat luas terhadap suatu hal yang bersifat penting teutama dalam bidang politik disini banyak sekali keuntungan yang di dapat diantaranya dapat mengembangkan nilai, sikap, pendapat, keyakinan, prilaku yang kondusif serta bagaimana caranya agar bisa menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsanya dan menjadi warga negara yang baik bagi bangsanya. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara mana pun, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, dan sebagainya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalamanpengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberikan bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik dan tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur.

Berikut adalah beberapa yang dapat dilakukan masyarakat agar dapat memberikan espons positif terhadap perkembangan budaya poitik yang ada di Indonesia, diantaranya:

a. Mengerti dan mampu malaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
b. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu.
c. Melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah.
d. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
e. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

f. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
g. Mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

a. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat tinggalnya.
c. Sebagai sarana rekruitmen politik, yaitu untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik (political recruitment) dan untuk melakukan pengkaderan terhadap generasi muda melalui pendidikan politik.

Ketika sebuah negara sudah bisa melihat perkembangan budaya politik yang ada di negaranya maka akan terlihat partisipasi yang berkembang pada otoriter pemerintahan tersebut diantaranya:

a. Rezim otoriter; warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik.
b. Rezim patrimonial; warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin tanpa bisa memengaruhinya.
c. Rezim partisipatif; warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
d. Rezim demokratis; warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Demokrasi yang ada di negara Indonesia sebaiknya harus difahami betul oleh para partisipan politik karena dengn begitu akan tercipta negara demokrasi yang menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia.

D. Budaya Politik Indonesia

Budaya politik yang dianut negara kita Indonesia yang menjadi penguat negara sebagai nilai nilai sacral yang dianggap sebagai pedoman bangsa Indonesia. Begitupun dengan budaya

politikyng ada di Indonesia selalu mengukuti sesuai perkembangan pada setiap zamanannya, hal itu terjadi Sebagian kecil di daerah kota yang telah memiliki kemajuan jauh berbanding dengan yang lainnya sehingga lebih mudah lebih mudah umtuk lebih menerapkan nilai nilai budaya politik karena besar kontribusi focus dalam bidang politik, denagkn daerah pedesaan lainnya kecil sekali perubaha budaya politik karena kurangnya informasi mereka baik itu tentang Pendidikan atau edukasi politik.

Indonesia sendiri mejalankan system pemerintahan yang republiknya menganut pada presiden yang mana di dalamnya terdapat berbagai partai yang berkntribusi untuk kemajuan negara Indonesia yang demokratis. Tidak hanya di negara Indonesia negara lain pun sekarang sudah banyak yang megagungkan demokrasi, negara Indonesia juga mengacu pada Sistem Trias Politika yang mana ekuasaaan tertinggi dipegang oleh Yudikatif, Legislatif dan Ekseutif. Pada zaman reformasi dengan adanya Lembaga Yudikatif dan dan juga adanya amandemen UUD 1945 yang mana telah berjalannya MK (Makhamah Agung). Sedangkan kekuasaan yang dipegang oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang menaungi Kekuasaan Legislatif yang mana di dalamnya bercabang menjadi dua bidak yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dEwan Perwakilan Daerah (DPD) di dalamnya memiliki masing masing perwakilan dari seluruh bagaian daerah. Begitujuga dengan Lembaga Eksekutif daerah yang mana didalamnya berpusat pada kekuasaan Presiden, Wakil Presiden Juga Jajarannya atau biasa kita sebut dengan nama kabinet. Yang terdapat pada kabinet ini, merupakan cabinet yang menganut presidensial, dalam cabinet tersebut merupakan cabinet yang melidungi presiden dari mulai mentri dan jajaran sebagainya, juga dalam cabinet ini tidak ada yang mewakili parlemen dari partai politik.

E. Budaya Politik Era Reformasi

Pada era reformasi ini budaya politik yang ada di masyarakat yakni mereka mampu memberikan gagasan serta opini yangselalu mengikuti juga antusias dalam kegiatan budaya politik. Dan terdapat Sebagian besar dari budaya politik di era reformasi ini masyarakat dan anggota poitik lainnya sudah banyak memahami dn memiliki

pengetahuan yang lusa tentang politik yang mana membawa pemahamn yang baik terhadap dimensi penetu budaya politik ke arah yang lebih maju lagi. Mereka sangat memadai dalam pegetahuan yang mana di dalamnya telah bayak membahas politik secara umum, diantaranya mengenai system politik, kebijakan poliyik, peran pemerintahan, serta kebijakan kebijakan yang lainnya.

BAB 6. INFASTRUKTUR POLITIK INDONESIA

A. Definisi Infrastruktur Politik Indonesia

Secara Bahasa, infrastruktur mempunyai arti bangunan bawah dengan kata lain infrastruktur berarti suatu sarana yang dibuat untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat umat manusia yang mencakup pada kegiatan ekonomi, politik, pendidikan dan seluruh kebutuhan yang lainnya

Secara istilah, Infrastruktur politik merupakan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kelembagaan masyarakat yang kebijakannya bisa dipengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. lembaga negara dalam melakukan suatu kekuasaan dan fungsinya masing-masing. Adapun perngertian infrastruk politik menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Coleman dan Almond

Almond dan Coleman menunjukkan bahwa infrastruktur politik dan suprastruktur politik memiliki tugas dan tujuan yang berbeda untuk dicapai.

2. Sri Soemarni

Pakar nasional, Sri Sumantri menjelaskan sistem politik sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang ada dengan berbagai subjek politik, termasuk suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

3. I Made Subawa

Pakar hukum dalam negeri lainnya, menjelaskan dalam buku ”UU Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” bahwa hak berserikat merupakan hak asasi yang termasuk hak politik

serta menjadi landasan pembentukan hak politik infrastruktur negara. Lalu infrastruktur politik diterangkan sebagai lembaga di luar kendali pemerintahan sertadibentuk oleh rakyat, keberadaannya turut andil mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan oleh lembaga negara. kemudian infrastruktur politik Indonesia merupakan badan yang ada pada masyarakat, contohnya, organisasi masyarakat, partai politik, tokoh politik, pranata politik dan media komunikasi massa lainnya. Infrastruktur politik mempunyai kegunaan sebagai penyampai aspirasi pada masyarakat. Partisipasi masyarakat lalu diharapkan semua keputusan pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

Sedangkan dalam ilmu politik infrastruktur politik merupakan struktur yang ada pada sistem politik yang menghubungkan antar satu sama lain, kemudian membuat rangkaian yang mendorong tumbuhnya suatu struktur yang ada. Adapun insfrastruktur politik terdiri dari :

1. *Interst group,*
2. *Political Party,*
3. *Media of Political Communication,*
4. *Kelompok penekan,*
5. *Kelompok jurnalis,*
6. *Kelompok pelajar,*
7. *Political* Figure.

B. Komponen Infrastruktur Politik, Peran beserta Fungsinya

Pada Infrastruktur politik mempunyai komponen-komponen yaitu :

1. Golongan Kepentingan

Akibat berragamnya golongan kepentingan yang ada, Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powel pada bukunya yang berjudul *Comparative Politics Today* : *A World View* (1992), terdapat kelompok kepentingan menjadi empat komponen, yaitu :

a. Kelembagaan Institusional (Lembaga)

Kelembagaan ini identik dengan golongan kelompok kelembagaan yang sudah mapan. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang sudah tersusun secara sistematis, mempunyai relasi yang luas, tujuan organisasi yang terarah, dan pemimpin yang dipilih melalui

seleksi. Contoh : POLRI, TNI, PGRI, KOPRI, dll.

b. Kepentingan Anomik

Awal mula munculnya kepentingan ini tidak sengaja atau kebetulan, sifatnya informal, hanya hadir pada isu tertentu saja serta juga bisa hilang begitu saja. Contoh : aliansi pedagang pasar yang bersatu ketika lapaknya akan digusur dengan melakukan aksi penolakan terhadap aparat yang bertugas. Kelompok ingin akan menghilang dengan sendirinya jika tuntuannya sudah terpenuhi.

c. Kepentingan Non-Asosiasional

Kepentingan ini juga bersifat informal, mempunyai kelembagaan dan organisasi yang lumayan mapan, keanggotaannya berawal dari keturunan serta tidak ada seleksi untuk memilih pemimpinnya. Contoh : Aliansi warga minang di Jawa Barat.

d. Kepentingan Asosiasional

Sebuah golongan yang dibentuk untuk mewakili kepentingan minat khusus atau khusus, dengan struktur yang mapan, penggunaan profesional, prosedur untuk mengembangkan minat dan persyaratan secara teratur, pemimpin yang dipilih dan tujuan tertentu.

Seperti pada Ikatan Dokter Indonesia, termasuk pada serikat pekerja dan serikat pekerja. Peran dan fungsi kelompok kepentingan adalah:

1) Media untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan atau merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, tetapi juga dapat diabaikan atau tidak terpenuhi. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai kepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
2) Mengartikulasikan Kepentingan Kelompok-kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada pengartikulasian kepentingan-kepentingan tertentu kepada pemerintah. mereka berharap Pemerintah merumuskan kebijakan yang menguntungkan kelompok ini. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperoleh kepentingan dengan cara mempengaruhi institusi politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari

keputusan yang tidak menguntungkan.

3) Sebagai salah satu saluran masukan pemerintah, kelompok kepentingan memberikan masukan, dan pemerintah menggunakan masukan tersebut untuk menentukan kebijakan terhadap rakyat. Masukan yang mereka berikan dirancang untuk memungkinkan pengambil keputusan memahami sudut pandang mereka dan memperoleh keluaran berdasarkan kebutuhannya.

Pada bukunya, Gabriel A. Almond menyampaikan bahwa saluran penting dan umum untuk menasihati pembuat kebijakan merupakan demonstras serta (mungkin) kekerasan; sikap ini sering dilakukan dalam mengkonsolidasikan klaim pada pemangku kebijakan pemerintah.

2. Media komunikasi politik

Berfungsi sebagai sarana penunjang hingga pemersatu berbagai kelompok politik. Alat komunikasi politik antara lain televisi, surat kabar, majalah, radio, dll. Sebagai subsistem dari sistem politik. Terdapat enam peranan dasar pada media komunikasi politik, yaitu:

a. Utusan

Media komunikasi politik ialah tahap dalam proses penyebaran informasi mengenai politik secara luas dari actore politik dan pemerintah pada masyarakat.

b. Saluran aspirasie

Berkambangnya media komunikasi politik saat ini menjadikan media sebagai sarana penyampaian suatu keinginan masyarakat pada pemerintah, yaitu mulai dari individu yang menjadi bagian dari masyarakat hingga keinginan pemerintah, pemerintah juga bisa diketahui masyarakat luas.

c. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat

Adanya media komunikasi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi antara pemerintah dengan masyarakat, begitu pula dari masyarakat ke pemerintahnya.

d. Umpan Balik

Media ini digunakan sebagai jembatan untuk memberikan umpan balik pada keputusan pemerintah terhadap rakyat. Dengan

adanya suatu media bisa di jadikan sebagai interaksi atau dapat merespon kebijakan baik itu menguntungkan masyarakat atau malah merugikan masyarakat.

e. Sosialisasi Politik

Media ini sangat berperan penting dalam aktivitas sosialisasi politik antara rakyat dengan pemerintah. Media social politik bisa mendidik serta mensosialisasikan masyarakat secara meluas mengenai kebijakan atau isu perpolitikan tertentu. Sama halnya di partai democrat atau saat pemilu, media berperan penting terhadap penyampaian sosialisasi kepada rakyat diluar itu.

f. Kontrol social

Media ini juga bisa digunakan partai politik yang ikut serta dengan masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Media ini dapat digunakan sbagai anjing penjaga, mengeritik, memberi masukan terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Partai Politik (parpol)

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang didalamnya mencakup struktur organisasi yang sudah mapan, pembagian tugas pokok dan fungsi, mempunyai suatu tujuan, ideologi dan juga perenacaan & program.

Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari parpol.

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Parpol mempunyai kewajiban untuk menyampaikan berbagai macam apresiasi serta usulan dari rakyat lalu mengemasnya dengan sedemikian rupa guna memperkecil berita yang simpangsiur di tengah masyarakat. Jika masyarakat mengajukan aspirasi secara independent makan suaranya bagaikan pasir yang diterjang angin, suaranya tidak akan didengar berbeda jika masyarakat bersatu dan mengajukan aspirasi maka suara itu lebih bisa diperhitungkan. Itu juga menjadi tugas partai politik sebagai penggabungan suatu kepentingan (interest aggregation).

Setelah disatukan, aspirasi serta masukan disatukan lalu di olah dan di rumuskan dengan sistematis, tahap ini disebut “perumusan kepentingan” (interst articulationt).

b. Sarana sosialisasi politik

Proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara setahap namun

secara berangsur-angsur yang sasarannya mulai dari remaja, dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, sosialisasi politik ini juga membahas bagaimana norma dan nilai-nilai yang berkembang dari suatu generasi ke generasi lainnya.

c. Sebagai sarana rekrutment

Parpol menyelenggarakan perseleksian serta pemilihan dan pengangkatan seseorang bahkan sekelompok orang yang bertugas untuk menjalankan berbagai fungsi pada sistem politik yang umum dan pemerintahan pada khususnya.

d. Sebagai prtisipasi politik

Parpol dijadikan sebagai sarana masyarakat dalam membantui pemengaruhan suatu proses perumusan serta implementasi suatu kebijakan public dan partisipasi dalam pemilihan kepala pemerintah.

e. Sebagai pemangku kepentingan

Parpol melakukan serapan, kegiatan analisis kepentingan, partai melakuakn penampungan, memadukan serta menganalisis berbagai kepentingan yang beragam, mulai dari kepentingan yang berbeda sampai kepentingan yang belawanan dengannya.

f. Sebagai pengendali konfliks

Partai politik memiliki tugas untuk mengelola suatu problem lewat perbincangan terhadap pihak yang memiliki problem, menyerap serta mengintegrasikan aspirasi dan kepentingan yang berbeda, serta menggusur suatu masalah ke dalam lubang permusyawarah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk keputusan politik.

4. Tokoh-tokoh Politik

Tokoh-tokoh politik ialah seseorang yang memiliki pengalaman, kepintaran serta keahlian di bidang politik. Seperti; Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais, Yusuf Kalla, dll. Selama menduduki bangku anggota DPR, mereka memiliki peran untuk rakyat, perannya berfungsi untuk menyampaikan aspirasi isi hati rakyat, seorang DPR perlu tahu kewajiban dirinya setelah dipilih, yang pada intinya tugas mereka adalah supaya keluh kesah isi hati rakyat dapat tersampaikan.

5. Kelompok penekan

Kelompok penekanan ialah suatu kelompok yang memiliki kegiatan yang tampak berdasarkan luar serta memiliki penguasaan dalam mempertahankan kehendaknya dalam pihak penguasa. Golongan ini merupakan forum kemsyarakatan yang dibentuk secara instan menggunakan kegiatan yang kegiatannya menaruh penekanan pada pihak yang berkuasa supaya kehendaknya bisa diakomodisir oleh sang pemegang kekuasaan tersebut.

Contoh seperti pada kelembagaan pemberdaya Masyarakat Peduli Nasib Petani dan lembaga Pemberdaya Masyarakat Penolong Korban Bencana Banjir. Awalnya kegiatan gerombolah-gerombolan ini dianggap biasa saja, akan tetapi berkembangnya kondisi serta syarat pengubahannya sebagai pressure group atau kelompok penekanan.

Adapun pada peranan ini berdasarkan gerombolan penekanan merupakan kelompok ini menyampaikan aspirasi berupa keritikan bagi pelaku politik lainnya.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan politik yang maju. Kelompok penekanan pula bisa mempengaruhi hingga menciptakan kebijaksanaan pemerintah melewati cara persuasi, propaganda, hingga alternative yang lebih stabil.

Mereka adalah industriawan & asosiasi-asosiasi lainnya. Kelompok penekan terhimpun pada beberapa asosiasi yaitu:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, dan
f. Yayasan atau Badan Hukum

C. Kredibilitas Media Massa dalam Politik Indonesia

Secara garis besar, media massa yang berada pada suatu sistem politik demokrasi ataupun otoriter mempunyai ciri yang berbeda, diantara keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Media massa yang berada pada sistem politik yang otoriter segala kebijakannya dikontrol oleh pemangku kebijakan secara penuh. Sebaliknya, media massa yang berada dibawah sistem politik yang demokratis mempunyai kebebasan dalam kegiatan

komunikasi politiknya bahkan dilindungi oleh Negara.

Pada sejarahnya media massa Indonesia pernah dikontrol secara penuh oleh pemerintah yakni pada masa orde lama dan orde baru. Pemerintahan kala itu banyak melakukan pembatasan-pembatasan bahkan pemberedelan media massa bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang dibuat pemerintah, contohnya : harian Merdeka di masa orde lama dan majalah Tempo pada era orde baru.

Proses komunikasi politik ssangat berpengaruh pada revolusi informasi, utamanya pada komunikasi internasional sebagai elemen penting dalam komunikasi politik. Masalah-masalah pokok pada komunikasi internasional adalah adanya dominasi negara maju pada ketimpangan arus informasi internasional.

Ada tiga hal yang aspek pendukung arus komunikasi dan informasi pada era globalisasi yang telah lama berlangsung antara lain:

1. Kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan
2. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan bisnis
3. Paradigma freedom of information atau lebih dikenal dengan kebebasan pers.

Ketiga hal ini memunculkan ketimpangan pada arus informasi informasi internasional dan antar daerah dalam suatu negara serta terjadinya dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang (Arifin,2011:78).

Media massa di dunia didominasi oleh berita dari negara-negara yang maju. 18 dari 20 berita yang tersebar di negara berkembang sangat tidak relevan dengan kepantingan negaranya. Hal tersebut tentu disebabkan 60-70% radio, televisi dan berita yang tersebar tersebut berasal dari UPI (United Pers International), REUTER, AP (Asociated Pers).

Dominasi diatas tentu bukan serta merta melalui media cetak saja, namun mereka memanfaatkan media elektronik dan media sosial. Maka dari itu wajar sekiranya majalah, surat kabar, radio dan televisi yang menyajikan tayangan-tayangan yang dibutuhkan masyarakat sangat marak predarannya. Negara-negara berkembang seperti seolah dipaksa untuk menerima seluruh berita itu secara mentah-mentah, hal ini tentu karena mereka menguasai pusat-pusat

produksi tayangan-tayangan tersebut.

Ketimpangan informasi di dunia beresiko merusak keadaan sosial kultural dan sosial politik negara-negara yang terdampak, terutama tentu mereka negara-negara yang sedang membangun peradaban. Hal tersebut bisa kita sebut kolonialisme dan imprealisme pada bidang komunikasi yang dilakukan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang,

Sudah banyak pertemuan-pertuam internasional yang membahas mengenai isu ini guna membahas dan menyelesaikan masalah ketidak adilan dan ketimpangan dibidang informasi dunia. Namun hingga sekarang belum adanya kesepakatan yang solutif, terutama pada usaha negara maju mempertahankan konsep kebebasan informasi. Bukan hanya itu komunikasi politik yang dilancarkan negara-negara maju itu turut berperan membentuk citra serta menggiring opini publik, tentu itu dapat mempengaruhi persepsi publik.

Uraian diatas telah sangat jelas memperlihatkan bahwa media massa atau kantor berita mempunyai peran sentral dalam mempengaruhi siklus politik. Tentu juga sangat tergantung pada orang yang memegang kendali atas media massa tersebut untuk kepentingan politis, sehingga media massa diperuntukan untuk alat kekuasaan dan sebaliknya bila media massa dipergunakan untuk berperan dalam mendorong demokratisasi pada suatu negara tentu akan berfungsi sebagai alat kontrol dan mampu mempengaruhi sistem politik di suatu negara dalam rangka membentuk budaya politik yang demokratis.

Maka dari itu, media massa bisa saja menjadi alat pengontrol politik bila dipakai untuk mencapai tujuan politik namun sebaliknya media massa juga bisa menjadi alat kontrol politik penguasa dalam mempengaruhi perspektif masyarakat pada suatu wilayah. Kita seharusnya menyadari bahwa peran media massa dengan komunikasi politik bisa menjadi alat perjuangan bagi suatu negara untung mengoptimalkan kepentingan publik.

D. Pengaruh Media Massa dalam Demokratisasi Politik

Menurut Cangara (Cangara, 2011:33) adalah; (1) memberi informasi pada khalayak mengenai apa yang sedang terjadi

disekitarnya, (2) memberikan Pendidikan kepada khalayak mengenaiarti dan signifikasi fakta yang terjadi, (3) mengajukan diri sebagai platform politik guna menampung aspirasi-aspirasi politik agar dapat menjadi bahasan dalam membentuk opini publik serta menyampaikan hasil dari opini publik kepada masyarakat.

Pada kehidupan berdemokrasi, pemilu dan pilkada diibaratkan sebagai raga dan ruh. Secara samar-samar pemilu dan pilkada berperan sebagai pesta demokrasi, seperti raga yang akan hidup bila diisi ruh media massa didalamnya. Bebasnya dalam menyampaikan informasi berdasarkan regulasi serta norma-norma kaidah kemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting dalam pilkada maupun pemilu.

Komunikasi politik dinegara bersistem politik dan budaya politik yang otoriter, alur informasinya dari pemerintah ke rakyat dan kebanyakan menggunakan teori peluru atau lebih dikenal dengan teori jarum hipodermik. Maka dari itu media massa sangat strategis di tempatkan di dekat kekuasaan dan di fungsikan sebagai alat yang digunakan penguasa untuk membimbing masyarakat. Sitem otoriter tidak mengenal kritik dan kontrol. Kebebasan individu dan media massa tidak sama sekali dijamin oleh negara dan tidak mengenal adanya kontrol sosial dan koreksi terhadap pemerintah.

Tidak jarang media harus meminta izin kepada pemerintah dan harus melalui sensor agar berita yang disebarluaskan kepada masyarakat tidak merugikan pemerintah, jika menyebarkan berita yang tidak berkenan bagi pemerintah, akan dikenai pencabutan izin operasional. Selain itu , kegiatan agitasi dan propaganda politik sangat dihargai. Sedangkan sebaliknya, kegiatan pertemuan masyarakat yang memakai komunikasi dua arah sama sekali tidak diperkenankan. Tidak heran jika opini publik bersifat semu.

Komunikasi di negara penganut demokrasi liberal, bertumbuh dengan demokratis, dari rakyat ke pemerintah, itulah yang meyebabkan media massa diletakkan jauh dari kekuasaan dan tentu dekat dengan masyarakat. Bebasnya media massa dan individu dijamin negara untuk melaksanakan kontrol dan melakukan koreksi terhadap pemerintah. Media massa pun tidak perlu memperoleh izin pemerintah dalam menyebarluaskan beritanya.

Program propaganda dan agitasi merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan tidak boleh digunakan, pertemuan publik lebih disukai karena kita bisa berinteraksi dengan bebas. Itu menjadi sebab pendapat umum dapat tumbuh sebagai kekuasaan keempat, disamping kekuatan legislative, eksekutif dan yudikatif (Arifin, 2011:27).

Sistem politik otoritarian maupun sistem komunikasi politik liberalian mengalami perkembangan sedikitnya terdapat masing-masing dua varian. Pada Liberalian adanya koreksi media, lalu lahirlah sistem tanggungjawab sosial dari media itu sendiri, lalu sistem ini dikoreksi Kembali, dengan kemunculan gagasan tentang gagagsan demokratik seorang partisipan. Sedangkan pada sistem otoritarian mempunyai dua versi, yaitu sistem media soviet komunis yang terdapat di Uni Soviet di zaman terdahulu, dan sistem media jenis pembangunan pada sejumlah negara berkembang.

Di Indonesia, kominikasi politiknya bersifat fleksibel serta berkembang beradaptasi terhadap perkembangan yang sedang terjadi. Saat masa orde baru alur komunikasi politiknya dari atas kebawah lalu saat masa reformasi berubah menjadi media massa yang bergerak dari bawah keatas dengan ketentuan kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dijamin sepenuhnya oleh negara. Dengan adanya kebebasan pers ini memunculkan fenomena baru, media massa acapkali menyalahgunakan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya.

Pada konsep pers Indonesia, pers harus bertumpu pada iedeologi dan budaya politik Pancasila, esensi konsep pers Pancasila adalah konsep yang mempunyai kode etik dalam jurnalistik. Contohnya wartawan akan merasa bersalah jika ia semena-mena myebarkan berita bohong, menyebar sensasi berlebihan, kekerasan dan berita cabul kepada masyarakat. Kegiatan jurnalistik Pancasila ini berdasar pada kebebasan positif yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Kegiatan komunikasi politik agitasi, propaganda dan pertemuan rakyat berjalan dengan prinsip Pancasila. Berjalan dengan selaras dan sejalan. Lalu opini publik acapkali bersifat semu dan juga terkadang menjelma menjadi kekuatan politik yang utama dalam kehidupan politik. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pemahaman

demokrasi yang dipegang dan diimplementasikan oleh masyarakat dalam rangka membangun demokrasi Pancasila.

E. Politik dan Mahasiswa

Sulit rasanya memisahkan antara mahasiswa dan politik, mahasiswa sudah banyak andil sebagai agen perubahan yang sudah terbukti eksistensinya sejak orde lama dan orde baru. Perubahan dari orde lama ke orde baru banyak dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sedangkan yang memotori Gerakan mahasiswa secara massif pada masa perubahan orde baru ke masa reformasi ialah Forum Kerjasama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Indonesia (FK-SMPTI), bekerjasama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dll.

Pergerakan mahasiswa terkadang hanya berfokus pada pendobrakan trobosan aspirasi rakyat tetapi masih kurang dalam mengawal perubahan atas apa aspek yang dituntut ketika aksi. Dibatasinya kegiatan mahasiswa dengan kebijakan sistem kredit semester 7 semester boleh malakukan sidang untuk memperoleh sarjana, sangat berdampak pada rendahnya minat mahasiswa untuk turut aktif pada kegiatan manusia, sehingga unit kegiatan mahasiswa menjadi lumpuh dan organisasi mahasiswa jatuh kepada fase mati suri.untuk mengatasi hal tersebut mahasiswa mngikuti extrakampus seperti: PMII, HMI, GMNI, KAMMI, LDK, dll.

Keterbatasan ruang gerak dan waktu dalam menempuh Pendidikan strata satu (S1) yang normalnya ditempuh hanya pada rentan waktu 4 tahun, waktu yang singkat untuk membangun dan melatih pemikiran kritis mahasiswa. Banyak mahasiswa yang melanjutkan pada kegiatan mahasiswa extrakampus serta organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), termasuk juga organisasi kepemudaan dari partai politik, seperti : Pemuda Ka’bah (PPP), Banteng Muda Indonesia (BMI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dll. Selain itu upaya mahasiswa dalam menjaga title kemahasiswaannya ketika telah selesai S1 lalu melanjutkan ke S2 dan S3. Ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai aktivis mahasiswa.

Eksistensi mahasiswa pada perpolitikan Indonesia sudah terbukti keberaniannya dalam melakukan aksi eksparlementer, namun

kadangkala aksi mahasiswa yang terlalu aktif dan agresif membuat mudahnya ditunggangi oleh kepentingan politik, rasa peka, kemurnian niat, rasa kepedulian yang kuat terhadap kepentingan sosial rasanya harus digalakan oleh mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi dan ditunggangi kepentingan-kepentingan politik. Namun mahasiswa juga mempunyai tugas sebagai agen perubahan dan memotori Gerakan moral dalam rangka melakukan perbaikan kondisi sosial pada negara kesatuan tercinta serta berdasarkan pada konstitusi kita yaitu : Pancasila, Demokrasi dan UUD 1945 yang diaplikasikan dengan konsekuen dan murni tanpa adanya kepentingan politik.

Mahasiswa merupakan generasi muda yang sedang menempuh Pendidikan tinggi pada jurusannya masing-masing, hal ini membuat mahasiswa lebih dikenal dengan generasi intelektual yang mempunyai tujuan untuk dicapai dalam waktu dekat. Pada umumnya mahasiswa akan lebih banyak melakukan kegiatan didalam kampus, karena mereka masih pada fase memperluas pengetahuan dan memperdalam pemikiran kritis agar terbentuknya pribadi yang berkapasitas tinggi dalam mengemban tugas sebagai agen perubahan.

Mahasiswa tidak dibebani keharusan dalam mengikuti ekstakampus maupun intrakampus, akan tetapi menurut penulis hal ini sangat sentral dalam mengembangkan potensi serta bakat mahasiswa, sedangkan dari pihak kampus memang hanya berupa saran dan himbauan agar mahasiswa dapat mengaktualisasikan diri pada kegiatan positif guna menghidari dari kegiatan negatif yang dapat menjerumuskan pada kesesatan berfikir dan bertindak. Kebanyakan mahasiswa yang aktif pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lebih terlihat mempunyai jiwa kepemimpinan dalam diri mereka sebagai softskills yang penting pada dunia kerja.

F. Media Sosial Sebagai Alat untuk Mengkritisi atau Pendukung Kebijakan Publik

Kegiatan media massa di Indonesia akhir-akhir ini bisa dikatakan telah menjelma menjadi industri. Dengan dikontaminasi unsur kapitalis, media massa dipaksa untuk memikirkan target pasar demi mendapatkan keuntungan baik dari hasil produksi konten maupun iklan, tanpa terkecuali dalam rangka menyajkan konten

politik, karena dengan dipengaruhi pemodal media massa akan condong untuk memperhatikan kepuasan pelanggan dan pengiklan yang berperan sebagai pasar mereka sebagai penikmat konten-konten politik. Padahal komunikasi politik di Indonesia memiliki keterkaitan secara ideologis dengan partai-partai politik, agama, nasionalisme dan sosialisme. Dengan demikian dapat kita amati pada masa pemilu, disaat warga Indonesia memperhatikan partai politiknya masing-masing.

Media massa acapkali dijadikan media komunikasi oleh penguasa, terdapat tradisi jurnalistik yang justru diawali karena adanya kepentingan para penguasa dalam memperluas kebijakan-kebijakan atas kekuasaannya. Kemudian di masa setelahnya, banyaknya kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan media sosial yang didasari oleh kepentingan-kepentingan politik belaka.

Di masa politik modern ini media sudah menjadi titik strategis untuk dimanfaatkan pada berbagai kepentingan personal maupun kelompok dalam melancarkan kepentingan-kepentingannya. Tidak selamanya sistem yang ada pada media massa diarahkan oleh sistem politik, tetapi tergantung pada siapa penguasa media yang berada di negara tersebut. Dimana setiap orang punya hak yang setara dalam kehidupan bermedia, maka dari itu semua media massa dapat dijadikan saluran komunikasi politik guna mampu mempengaruhi sistem politik yang berlaku.

Banyaknya informasi saran dan kritik terhadap pemerintah yang membahas kepentingan publik dengan media sosial memang tidak selalu mengandung unsur yang ideal sebagai masukan yang harus selalu tindaklanjuti. Meski demikian, bukan sebuah alasan untuk tidak memperhitungkan suara masyarakat di media sosial selama masukan itu positif dan kritik yang membangun pemerintah harus mempertimbangkannya.

Ada fakta yang menarik mengenai isu diatas. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan tersebut diraih karena kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014-2016, menurutnya penghargaan yang telah diraih tersebut tidak terlepas dari memperhatikan kritikan dan saran yang kerap di

temukan di media sosial.

Pada dasarnya yang rakyat nilai ialah kinerja dari badan publik dalam tugas menyelenggarakan program-program yang telah disusun pemerintah yang tentunya berkaitan dengan kentingan rakyat itu sendiri, rakyat juga mempunyai peran sentral dalam perumusan kebijakan yang digarap para pemangku kebijakan, dimana rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dalam pembentukan regulasi.

Jikalau kebijakan publik yang seharusnya dijalankan sesuai prosedur yang berlaku tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh badan publik maka, wajar kiranya muncul banyak kritikan dari rakyat melalui media sosial. Banyaknya kritik di media sosial mampu membuat posisi badan politik menjadi melemah bahkan bisa lebih jauh melemahkan pemerintahan secara umum. Tetapi, tidak seluruh kritik terhadap pemerintahan bermuatan positif, bisa aja karena kemudahan memberikan pesan membuat kritik yang dilontarkan tidak pantas untuk ditindaklanjuti.

Dalam pandangan golongan-golongan pengakses sosial media tentu saja mempunyai perbedaan, ini mudah saja terjadi ditengah masyarakat. Unsur fundamental yang ada pada media sosial : pertama, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda, dan online menjadi saluran utama. Kedua, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang dalam menyikapi keadaan. Ketiga, media sosial bersifat partisipatif. “penonton/ khalayak” mempunyai hak bicara dianggap kreatif, sehingga dapat memberikan komentar apapun (Evans, 2008 : 34).

Meskipun demikian media sosial mendukung terhadap kebijakan-kebijakan politik yang muncul dalam bentuk kepuasan rakyat terhadap kerja dari aparatur pemerintah yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan-kebijakan publik dapat terselenggara dengan baik. Biasanya, suara kritik yang pro terhadap kebijakan publik bisa saja tenggelam oleh maraknya kritik kontra di media sosial, meskipun kritik itu tidak berlandaskan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak juga bisa kita acuhkan begitu saja di era kebebasan berkomunikasi ini, informasi bukan hanya diproduksi oleh elite yang berada pada piramida kekuasaan negara tapi hampir semua rakyat mempunyai hak

membuat berita guna menanggapi kerja para pemangku kebijakan baik positif maupun negative.

BAB 7. PERAN DAN FUNGSI KOMPONEN-KOMPONEN INFASTRUKTUR POLITIK INDONESIA

Komponen-komponen sistem politik ini penting untuk pembentukan kebijakan publik dan sosial yang baik, tetapi di sisi lain, jika komponen sistem politik tidak berfungsi sesuai peran dan fungsinya, kebijakan publik yang bertanggung jawab. Mereka menyerah politik karena tidak memiliki nilai-nilai yang mereka harapkan.

Infastruktur politik disini memiliki beberapa komponen didalamnya antara lain:

A. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu komponen infastruktur politik yang mana partai politik ini lahir di bagian Eropa Barat dengan gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik, sehingga partai berkembang dan berinteraksi dengan rakyat di satu sisi dan dengan warga negara di sisi lain. Pada umumnya partai politik merupakan cerminan dari sistem politik saat ini atau sistem politik modern.

Partai politik merupakan suatu organisasi nasional yang didirikan oleh rakyat Indonesia. Mereka berjuang secara sukarela yang didasari oleh kesamaan cita-cita serta cita-cita politik, sosial dan nasional serta melindungi negara dengan cara menjaga serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Di Indonesia, partai politik merupakan jantungnya demokrasi. Dalam artian,, keberadaan demokrasi tanpa partai adalah situasi yang tidak adil. Karena peran partai begitu penting, mereka berharap untuk memastikan demokrasi yang sehat dan efektif dengan menciptakan lingkungan partai yang sehat dan efektif, pilihan kepemimpinan, pendidikan politik dan kontrol sosial.

Fungsi utama partai adalah mencari kekuasaan, memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi bagaimana partai politik bisa berkuasa? Ini akan terjadi setelah pemilihan umum. Dalam memenuhi fungsi ini, partai politik memenuhi tiga fungsi umum partai: pemilihan calon. Setelah selesainya seleksi calon, langkah selanjutnya adalah memulai kampanye pemilihan dan

melakukan kampanye pemilihan setelah calon terpilih pada pemilihan umum berikutnya. Setibanya di sana, partai politik menjalankan fungsi negara (legislasi atau penegakan)

Dalam bukunya, Partai Politik Indonesia dan Sistem Pemilihan Umum, Dr. Muhammad Labolo/Tegu Ilham, S. Firmanza menjelaskan bahwa peran dan fungsi partai terbagi secara internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik memainkan peran utama. Pelatihan, interpretasi dan pembentukan anggota partai untuk melanggengkan ideologi politik pembentukan partai. Di sisi lain, fungsi eksternal memainkan peran partai politik. Bidang yang lebih luas: masyarakat, negara dan bangsa. Bagaimanapun, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi dan kondisi konstitusional, moral dan etika masyarakat.

Adapun penjelasan menrunut salah satu pakar yang bernama Miriam Budiharjo, beliau menjelaskan bahwa peran dan fungsi Partai Politik itu terbagi menjadi 4, antaralain:

1. Sarana komunikasi politik

Komunikasi politik merupakan suatu bagian penting dari budaya dan sosialisasi politik. Ketika berbicara mengenai budaya dan sosialisasi yang terdapat dalam politik, kita juga harus memikirkan komunikasi dalam politik. Oleh karena itu, komunikasi politik ini merupakan salah satu fungsi budaya serta sosialisasi politik. Analisis sistem politik memperhitungkan struktur yang menjalankan fungsi politik dan cara komunikasi berlangsung.

Menurut (Budiardjo,2005:4.28). Struktur yang melaksanakan komunikasi politik dapat dibedakan menjadi lima jenis.

a. Komunikasi tatap muka yang sifatnya informal serta merupakan salah satu bentuk yang paling utama untuk berkomunikasi.
b. Struktur sosial yang bukan termasuk pada kelompok politik yakni kelompok ekonomi, agama dan keluarga.
c. Struktur politik pendapatan, contohnya seperti partai politik, kelompok kepentingan serta masyarakat sipil.
d. Struktur produk politik, seperti halnya lembaga eksekutif, legislatif dan birokrasi.

e. Yang terakhir ada media yang meliputi surat kabar, radio dan televisi.

Masing-masing dari lima struktur yang disebutkan di atas memainkan peran unik dalam fungsi komunikasi ini sehingga, sulit untuk menyatakan mana yang lebih penting dari yang lain.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik disini merupakan sebagai suatu alat pada sosialisasi politik. Pada ilmu politik, sosialisasi politik sendiri didefinisikan sebagai suatu proses memperoleh sikap atau arah individu terhadap suatu fenomena politik yang ada. Proses sosialisasi ini biasanya bertahap juga melibatkan transmisi norma dan nilai dari generasi ke generasi atau dari anak-anak hingga orang dewasa.

Menurut Syarbaini et al (2004) melaporkan dalam Jurnal Efektivitas Sosialisasi Politik pada Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum 2014 bahwa sosialisasi politik merupakan visi politik anggota masyarakat dan proses pembentukan kepemimpinan. Melalui proses ini, sikap dan arah kehidupan politik dalam masyarakat terbentuk. Proses sosialisasi politik ini berlangsung seumur hidup: kehidupan keluarga, lingkungan dan hubungan sosial, pendidikan formal atau informal, dan kontak dan pengalaman sehari-hari.

3. Rekrutmen Politik

Merekrut politisi adalah proses menemukan orang-orang berbakat dan baru dalam masyarakat itu sendiri dan mereka yang ingin berpartisipasi dalam proses politik partai. Sumber daya rekrutmen politisi adalah peran partai politik, yang penting untuk berfungsinya sistem politik. Jika elit politik tidak melakukan tugasnya, sistem politik dalam bahaya. Oleh karena itu, sebagai alat untuk memilih politisi, partai politik memainkan peran penting dalam isu-isu berikut:

a. Persiapan eksekutif pemimpin politik
b. Tentukan pilihan eksekutif yang telah disiapkan
c. Berjuang dalam menempatkan pengurus yang berkualitas, berbakti, tulus dan dukungan masyarakat pada posisi politik yang strategis (Yuliono, 2013: 179)

Pada judul makalah menyebutkan bahwa Mohammed Rezki

Albian Pradana memiliki peran politik sebagai perekrut politik calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum Lombok Timur 2019. Seperti halnya rekrutmen politik parpol, salah satu tugas kelompok kerja adalah merekrut warga untuk berperan aktif dalam proses politik. Pilihan ini penting karena merupakan prinsip utama kepartaian dalam sistem demokrasi. Pemilihan partai menentukan kualitas kepemimpinan masyarakat, sehingga partai berikutnya dapat menghasilkan tokoh masyarakat melalui mekanisme demokrasi. (Adela, 2012: 3).

4. Pengatur Konflik

Partai politik mengelola perselisihan pada masyarakat, karena nilai dan kepentingan yang tumbuh pada kehidupan masyarakat itu sangat beragam dan kompleks. Jumlah partai politik di Indonesia sangatlah banyak, sehingga perbedaan kepentingan yang sangat beragam ini dapat dipandu melalui polarisasi pada partai politik tersebut yang menawarkan ideoligi, program serta alternatif politik yang berbeda.

Sebagai pengatur dalam perselisihan partai politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana penyatu yang dapat mengarah pada berbagai aspek kepentingan yang berbeda melalui jalur politik dan kelembagaan partai. Partai politik juga akan terus berusaha dalam mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan dan mempengaruhi kebijakan politik negara.

B. Golongan Kepentingan

Menurut (Benditt 1975:34) pada jurnal Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik karya Muhammad maiwan bahwa kelompok kepentingan adalah "*a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*" (sekelompok orang dengan tujuan bersama yang memotivasi mereka untuk bersaing dengan pemangku kepentingan lainnya).

Berdasarkan definisi diatas bahwa fungsi pada golongan kepentingan ini hanya terbatas pada agregasinya dan artikulasi kepentingan. Golongan tersebut merupakan sekelompok organisasi dengan tujuan yang sama dan aktif dalam upaya mempengaruhi

pemerintah. (Janda, Berry, & Goldman 1997)

Dengan kata lain, kelompok tersebut terdapat kesamaan penyebab dan mengakibatkan kelompok tersebut menjadi sebuah organisasi non-pemerintah yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Kelompok kepentingan ini juga dapat membujuk para pejabat agar bertindak sesuai dengan suara pada anggota kelompok tersebut.

Pada kenyataanya, terdapat berbagai jenis kelompok yang berusaha bertindak dalam masyarakat dan mempengaruhi kebijakan yang pemerintah lontarkan. Sebagai aktor yang bukan termasuk pada pemerintahan, mereka juga dapat mengambil dalam bentuk : kelompok ahli, serikat pekerja, pedagang, pengusaha, kelompok agama, serikat mahasiswa, asosiasi akademik, asosiasi akademik, universitas, daerah, keturunan dan lain sebagainya.

Menurut Almond dan Powell (1980) kelompok kepentingan terbagagi menjadi empat jenis dalam penelitian klasik :

a. Pertama, kelompok abnormal segera muncul, kelompok dengan minat sukarela dan terbatas. Kelompok kepentingan yang memiliki keterampilan komunikasi politik tingkat rendah, keanggotaan yang rendah, dan hanya menanggapi peristiwa tertentu saja. Kelompok ini juga merupakan suatu kelompok terobosan yang mana dalam sistem politiknya merespon sebuah isu spesifik yang berujung pada protes dan keributan. Namun, setelah aspirasinya didengar oleh pihak pemerintah maka kelompok tersebut akan bubar. Mereka itu contohnya seperti: warga penghuni Kalijodo, pemersatu pedagang rotan di Rawasari dan sejenis lainnya.
b. Kedua, ada kelompok kepentingan non-federal adalah suatu kelompok yang kosong, terorganisir secara informal, dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Jaringan di dalam grup inipun hanya terbatas, tetapi lebih baik dari grup yang di atas tadi. Grup non-afiliasi beda dari grup anonim dalam hal keanggotaan. Anggota biasanya memiliki latar belakang atau identitas yang sama. Kelompok ini meliputi kelompok berdasarkan asal, suku, agama, daerah, status, dan kelas sosial. Contoh dari kelompok kepentingan ini yaitu trah keluarga Mangkunegara. Ikatan Daerah Jakarta Yogyakarta, Ikatan Dayak

Kalimantan, Ikatan Pedagang Bugis, lulusan ITB, lulusan pendidikan Remhannas, lulusan Pondok Pesantren Gontor, perkantoran, desa serta lainnya.

c. Ketiga adalah kelompok kelembagaan, kelompok pemangku kepentingan kelembagaan formal dengan fungsi tetap dan jaringan organisasi dan anggota formal yang kuat. Pada kelompok kepentingan ini memiliki berbagai fungsi social, politik yang hampir setiap aspek kehidupan meliputi: social, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, seni, lingkungan dan keluarga. Ada juga target khusus yang tumbuh, seperti Organisasi Ulama Nahuatl (NU). Mohamedia; Persatuan Islam (Persia); Ilmuwan Indonesia dan masyarakat lainnya.
d. Keempat, kelompok asosiasi adalah kelompok yang memiliki organisasi resmi, terorganisir dengan baik, dan merupakan anggota formal. Kelompok perkumpulan terdiri dari orang-orang yang mempunyai profesi tertentu, untuk tujuan tertentu, serta untuk mewakili kepentingan pada anggota bidang tertentu juga. Contoh: Persatuan Teknologi Indonesia (PTI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamar Dagang (IDI), Ikatan Pendukung Indonesia (IAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan lain sebagainya.

Empat kelompok diatas merupakan kelompok kepentingan yang efektif dalam penyampaian pendapat pada pemerintah, kemungkinan juga akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat merupakan kelompok institusional serta kelompok asosiasional. Kolompok kepentingan yang tidak efektif yaiti kelompok anomik dan kelompok nonassosiasional.

Pertumbuhan pada kelompok kepentingan ini hampir identik dengan pertumbuhan partai politik. Namun, partai politik yang cenderung mendapatkan suara dan merebut kekuasaan. Indonesia juga memiliki berbagai kelompok kepentingan yang sudah mendukung partai politik dan mereka aktif di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.

Beberapa dari mereka menjadi pemimpin partai. Ada kelompok kepentingan yang pertama kali muncul di Indonesia kolonial, seperti Sarykat Dagang Islam (SDI) dan Nahdlatul Ulama,

yang menyebabkan awal munculnya serikat pekerja, serikat pekerja, perkeretaapian, taman mahasiswa, koperasi dan partai kolektif. Organisasi ini dapat menjadi organisasi yang lebih besar dan dapat mempengaruhi kebijakan publik.

C. Media Komunikasi Politik

Teknoligi komunikasi semakin berkembang dan sudah menjalar pada kehidupan manusia. Salah satu bukti bahwa bentuk teknologi komunikasi ini telah berkembang pesat yaitu adanya media baru, yang mana media baru ini dapat menghasilkan sebuah sarana komunikasi tanpa adanya pertemuan antar individu yaitu media sosial. Dengan hadirnya media sosial pada kehidupan manusia, media sosial ini dapat mempengarui dalam bidang politik, sebagaimana yang telah sebutkan oleh studi di Amerika Serikat bahwa media sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk kampanye yang efektif.

Media komunikasi secara harfiyah adalah merupakan suatu layanan penerimaan pesan, informasi atau berita kepada dua orang atau lebih. Jika dihubngkan dengan unsur politik, maka politik juga memerlukan komunikasi agar proses nyampaian informasi terkait kebijakan dari pemerintah pada masyarakat, begitupun sebaliknya.

Ada majalah berjudul "Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017". Menurut analis politik Michael Rush dan Phillip Altoff (dikutip oleh Rusnaini, 2008: 34), "Komunikasi politik adalah proses pemindahan informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antar sistem politik."

Secara khusus, ada beberapa ahli yang mengangkat masalah komunikasi politik berdasarkan pengamatan dan pendapat berikut:

a. Muller

Menurutnya komunikasi politik merupakan suatu hasil yang sifatnya politik jika berfokus pada hasilnya. Begitu juga, jika komunikasi politik dinyatakan bahwa dengan menekankan perannya yang ada pada sistem politik, itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah sistem politik dan lingkungan sistem politik tersebut.

b. Almond dan Powell

Menurutnya bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi politik yang memiliki berbagai fungsi didalam system politik

tersebut. Contohnya seperti integrasi, koneksi, ketenagakerjaan, dan sosialisasi. Komunikasi politik adalah suatu kondisi atau syarat untuk terlaksananya fungsi-fungsi politik lainnya.

c. Fagen (1966)

Fagen menganggap komunikasi politik sebagai suatu aktivitas yang ada pada komunikasi. Akibatnya, komunukasi politik dianggap politis dalam hal ketepatan waktu dan kemampuannya untuk berfungsi dalam sistem politik.

d. Miriam Budiardjo

Ia berpendapat bahwa komunikasi politik ini tergolong pada salah satu fungsi yang harus ada didalam partai politik, mendikte dan mengatur berbagai pendapat serta aspirasi-aspirasi rakyat. Komunikasi politik juga merupakan bentuk konsolidasi dan perumusan kepentingan yang bermanfaat dalam memperjuangkan ketertiban umum.

e. Meadow (1980)

Menurut Meadow, komunikasi politik adalah upaya untuk bertukar simbol atau pesan, yang sebagian besar dibentuk oleh topik yang terlibat dalam komunikasi itu. Komunikasi politik juga mempengaruhi sistem politik.

Media komunikasi politik sangatlah penting, karena dengan adanya media komunikasi politik yang dapat mendukung serta mempersatu anatar golongan politik. Selain melalui media sosial, terdapat pula beberapa alat komunikasi yang bisa dijadikan sebagai media komunikasi politik contohnya seperti televisi, surat kabar, brosur, radio dan lain sebagainya. Terdapat pula beberapa peran media komunikasi politik yaitu :

a. Penyampaian Informasi

Media komunikasi sangat memudahkan untuk menyampaikan sebuah informasi yang mana media informasi merupakan akses atau sarana untuk menyampaikan dan menyebarluaskan suatu kabar mengenai informasi politik. Informasi yang sampai pada masyarakat merupakan informasi yang *real* berasal dari pemerintah itu sendiri.

b. Penyalur Aspirasi

Adanya media komunikasi politik, rakyat sangat mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu individu rakyat yang

menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang mana aspirasi tersebut dapat diketahui pula oleh masyarakat luas.

Misalnya terdapat seseorang yang ingin menyampaikan sebuah aspirasinya melalui sebuah media salah satunya adalah media sosial, dirinya menyampaikan aspirasinya yang mana aspirasinya tersebut dapat dilihat pula oleh banyak orang.

c. Penghubung Antara Pemerintah dengan Rakyat

Jika dibandingkan dengan zaman dulu sebelum adanya komunikasi, mungkin informasi dari pemerintah untuk sampai pada masyarakat itu sangat susah atau memerlukan waktu cukup lama untuk tersebat luasnya. Namun, dengan adanya media komunikasi bertujuan sebagai penghubung dan lebih memudahkan lagi komunikasi anatara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakatpun akan cepat mengetahui persoalan kebijakan yang di informasikan oleh pemerintah.

d. Umpan balik

Media komunikasi saat ini memiliki jangkauan yang sangat luas,misalnya pemerintah menginformasikan soal kebijakan yang akan disah kan melalui media sosial, namun kebijakan tersebut belum tepat menurut masyarakat dan terdapat sanggahan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu berkomentar melalui media tersebut dan menimbulkan umpan timbal balik antara keduanya.

Oleh karena itu, media komunikasi sangat penting pada system partai politik, karena media komunikasi dapat menghasilkan sarana umpan balik didalamnya. Dengan adanya peran umpan balik ini masyarakat dapat menanggapi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Sosialisasi Politik

Menurut salah satu ahli yang bernama Gabriel A. Almond, “Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi, di mana setiap anggota masyarakat secara khusus membentuk nilai-nilai politik yang mencerminkan bagaimana ia berpartisipasi dalam sistem politik. Kebanyakan anak belajar sejak dini untuk memahami sikap dan aspirasi politik masyarakat.” Oleh karena itu, media komunikasi politik ini memiliki peran penting dalam sosialisasi politik, karena dengan adanya sosialisasi politik di media,masyarakat akan

mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan, problem dan persoalan isu politik secara meluas.

Selain itu, media komunikasi politik juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk kampanye. Ketika akan melaksanakan pemilu, para calon kandidat dapat menyampaikan sebuah visi dan misi mereka melalui media, sehingga masyarakat dapat menilai mengetahui secara luas.

f. Kontrol Sosial

Dengan adanya kontrol social dalam media komunikasi politik disini yaitu agar dapat mengawasi dalam pemeberi masukan untuk rakyat mengenai kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Sehingga kontrol social ini berperan sebagai penengah anatara rakyat dengan pemerintah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam kebijakan yang dikeluarkan.

D. Golongan Penekanan

Kelompok penekan adalah kelompok di mana aktivitas eksternal tampaknya memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka pada pihak berwenang. Kelompok penekan adalah sekelompok individu dalam bentuk entitas sosial, yang kegiatan atau kegiatannya memberikan tekanan pada penguasa untuk memungkinkan yang berkuasa menanggapi kebutuhan mereka. Misalnya, LSM tertarik dengan nasib petani dan LSM yang membantu korban gempa. Kegiatan kelompok-kelompok ini pada awalnya normal, tetapi karena keadaan berubah, mereka menjadi kelompok kepentingan. (Bambang S dan Susanto. 2007: 177)

Peran kelompok kepentingan adalah untuk dapat mengkritik pihak lain, dan tujuannya untuk memajukan dunia politik. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi dan membentuk kebijakan publik melalui persuasi, hubungan masyarakat atau alat efektif lainnya, termasuk industri dan asosiasi lainnya. Kelompok kepentingan dapat terdiri dari asosiasi berikut:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi non-pemerintah mencakup semua jenis organisasi masyarakat sipil di luar struktur formal dan saluran administrasi publik yang tidak berbentuk dan merupakan bagian dari struktur nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga merupakan

lembaga yang didalamnya terdapat anggota warga negara Republik Indonesia itu sendiri yang secara sukarela atau tidak, sebagai bentuk peran masyarakat, melakukan kegiatan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan organisasi/lembaga. - Perhatikan asosiasi dan layanan swadaya.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang berperan sebagai jembatan atau perantara antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, lembaga ini memiliki peran yang amat kuat sebagai suatu kekuatan politik Indonesia dan bisa mengarah tidak hanya pada pembentukan mekanisme kontrol, tetapi juga peran kontrol atas semua kegiatan pemerintah harus sejalan dengan tujuan sosial. Protes oleh organisasi non-pemerintah diperbolehkan jika tidak untuk kepentingan umum. LSM berperan penting pada kehidupan masyarakat, LSM juga merupakan suatu alternatif pembangunan masyarakat sipil. (Afan Gafar: 2006).

2. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

Secara istilah, kelompok agama adalah suatu bentuk sistem sosial yang terbentuk atas dasar tidak hanya agama tetapi juga memiliki kesamaan aktivitas dan pekerjaan. Pada organisasi keagamaan ini bertujuan untuk mengembangkan serta menyebarkan luaskan kehidupan beragama dalam rangka memajukan kepentingan beragama mereka yang melibatkan kehidupan masyarakat.

Menurut Gillian dan Gillian, “mari kita klasifikasikan interaksi sosial yang dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu dalam hal ini proses interaksi yang lebih mengarah kepada kerjasama yang melibatkan penerimaan serta asimilasi, atau disebut juga proses interaksi asosiatif. Proses disosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang menimbulkan kesenjangan dalam hubungan sosial, termasuk persaingan, pertentangan, atau konflik.

Interaksi sosial umat Islam adalah suatu interaksi sosial yang dinamis dan sering terjadi antara individu dan kelompok kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan komunitas Islam di sini antara lain organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muslim Shalafi, Khilafah dan Muhammadiyah.

Mengingat situasi di Indonesia yang meliputi SEKARANG dan Muhammadiyah, serta berbagai ormas Islam, masih banyak ormas

di Indonesia, sehingga perbedaan ormas Islam merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Dengan pemikiran ini, pemerintah mempromosikan perlindungan orang percaya dan hidup berdampingan secara damai. Maka masyarakat Indonesia membutuhkan kerukunan beragama yang baik.

3. Organisasi Kepemudaan,

Kelompok pemuda adalah forum untuk inklusi kaum muda terutama berdasarkan pekerjaan, primitivisme, agama dan preferensi serupa lainnya. Organisasi ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga resmi yang mengutamakan semangat pemuda, kesadaran pemuda dan tanggung jawab sosial pemuda. Kegiatannya sangat bervariasi tergantung pada politik, ekonomi, masyarakat, budaya, pemuda dan masyarakat. Mereka kreatif, dinamis, berorientasi masa depan, inovatif dan produktif, sehingga perlu pembinaan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal dan berguna bagi negara dan pembangunannya.

Berdasarkan kesamaan visi organisasi, setiap organisasi kepemudaan harus bertujuan untuk memajukan organisasi, mengangkat nama dan diakui sebagai badan hukum resmi di negara dan masyarakat, serta memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi organisasi.

Dalam lingkungan hidup politik, organisasi kepemudaan ini dapat mempromosikan pemimpin politik yang baik dan kompetisi politik yang demokratis serta mendirikan lembaga penegak hukum. Pada tataran politik, organisasi pemuda dapat mendidik generasi muda tentang pentingnya pendidikan politik bagi demokrasi. Persaingan politik memang penting, namun kesempurnaan, dengan harapan menang atau kalah, selalu diutamakan agar tidak terlibat dalam anarkisme yang merusak keutuhan dan persatuan bangsa. Pada pemilihan pemimpin politik nasional dan lokal dan dalam pemilihan presiden, organisasi pemuda boleh atau tidak boleh mengundang orang muda lainnya - pemimpin yang tunduk pada supremasi hukum, hak asasi manusia, identitas nasional dan partisipasi penuh. Mengambil posisi multidimensi akan menjaga keutuhan NKRI.

4. Organisasi Lingkungan Hidup

Hukum Perdata Lingkungan dilakukan dengan dua cara, yang pertama jalur litigasi (in corut), menggunakan pengadilan. Yang kedua, melalui proses non-litigasi (luar pengadilan) artinya diselesaikan menggunakan cara berdamai Penegakan hukum lingkungan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana lingkungan terpadu yang diawali dari tahap penyelidikan dan penyidik, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan penegakan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan hidup harus dilakukan melalui proses peradilan, dan ke depan tidak mungkin lagi menggunakan cara lain seperti musyawarah dan negosiasi.

Salah satu tekanan dari masyarakat (kelompok lingkungan) adalah pergi ke pengadilan. Pasal 38 (1) Memberikan landasan hukum atau hukum acara dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan model kemitraan untuk mendukung fungsi lingkungan dari Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan salah satu organisasi yang terdapat di lingkungan hidup yang independen terbesar di Indonesia. WALHI terwakili 26 wilayah dengan 436 organisasi anggota. WALHI terdiri dari LSM, kelompok lingkungan dan LSM berdiri pada 15 Oktober 1980 sebagai mana tanggapan atas keprihatinan dan ketidakadilan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam serta mata pencaharian yang timbul dari paradigma baru stabilitas dan pembangunan mandiri.

5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM

Pembela hak asasi manusia merupakan bagian masyarakat yang menuntut agar negara menghormati dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional mereka. Seseorang memiliki hak dalam memainkan peran penting dalam menerapkan sistem hak asasi manusia internasional.

Istilah pembela HAM dipakai sehabis adanya "*Declaration on the Right and Resportsibility of Individuals. Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*" yang lalu lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor : 53/144

tahun 1998. Pasal Dekalarasi Pembela HAM ini menyatakan: "*Everyone has the right, individually and in association with others lo promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms al the national and international levels*".

E. Tokoh Politik

Dalam suatu partai di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kecerdas, memiliki pengalaman serta paham akan persoalan politik. Tokoh politik berperan penting dalam suatu partai politik. Mereka di partai berperan aktif sebagai saluran hisap. Politisi terutama mereka yang pernah menduduki DHR (Devan Pervakilan Rakyat).

Berikut yang merupakan tokoh politik di Indonesia:

1. Amien Rais

Meski namanya tak lagi menjadi bagian dari struktur kepemimpinan partai, pengaruh Amiens Rice merupakan pendiri dan ketua Komite Kehormatan Partai Rakyat Nasional (PAN) tetap kuat. Pengaruh dan kekuasaan Amien Rais di Partai ini tidak akan pudar, karena anaknya beliau akan terus berkarya, menjadi pengurus dan menjadi pengurus Partai PAN. Sore harinya, tidak hanya satu anak Amiens Rice yang tersisa, tetapi empat.

2. Megawati Soekarnoputri

Megawati Sukarnoputri salah satu putri dari Soekarno merupakan presiden RI yang pertama. Ia menjabat sebagai ketua umum PDIP, ia juga terus membangun pijakan dalam politik. Puan Maharani, merupakan salah satu anak Megawati juga meneruskan jejak didunia politik.

Poin dikenal sebagai anggota komite IV DPRK selama dua tahun, hingga akhirnya meninggalkan DPRK. Dari 2014 hingga 2019, Menko PMK (Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) terpilih. Pada pemilu 2019, Fuan terpilih kembali di Republik Rakyat Demokratik Korea RI melalui PDIP dan berkampanye untuk pemilihan pusat. Lingkaran Jawa. Ia saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan Poin, putra Megawati, Muhammad Flananda Prabov, menolak ikut serta dalam pemilihan umum 2019. Dari 2015 hingga 2020, ia adalah satu-satunya presiden Ekonomi Kreatif PDIP. Megawati juga

merupakan presiden wanita pertama di Indonesia.

3. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menunjukkan karakter politiknya sebagai ketua umum Partai Demokrat. SBY terjun ke dunia politik setelah dibebaskan dari militer dan memenangkan pemilihan presiden dari tahun 2004 hingga 2009. Selain itu, dua putra SBY juga menjadi terkenal setelah ayah mereka pensiun dari pemerintahan.

Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di ambang pensiun setelah 15 tahun mengabdi. AHY menerima Adhi Makayasa dari Akademi Militer Jepang (Akmil) pada tahun 2000 dan resmi pensiun pada September 2016. Laga pertama AHY berlangsung pada 2007 di Pilkada DKI, di mana pada putaran pertama DKI kalah dari official Jakarta Silviana Murney.

Sebelum AHY terjun dalam dunia politik, putra kedua SBY yang bernama Eddie Basketball Yudhoyono, terjun ke dunia politik. Edhi bergabung dengan DPR pada 2009 setelah memenangkan pemilihan umum. Tahun ini, Ibas yang akrab disapa Edhi Baskoro Yudhoyono kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan yang sama, daerah pemilihan ketujuh di Jawa Timur.

4. Dinasti Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan

Hal ini bertentangan dengan kebijakan dinasti Sulawesi Selatan. Keluarga besar Gubernur Sulawesi Selatan yakni Syakhr Yasin Limpo bagaikan air sungai yang terus mengalir. Sahr terpilih menjadi seorang Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008-2013 serta 2013-2018 (dua priode). Sakhrul adalah salah satu anak dari Kolonel HM Yasin Limpo (Yasin Daeng Limpo), yang tutup usia pada 4 Agustus 2009. Yasin Limpo adalah orang yang disegani di Sulawesi Selatan. Ia menjabat sebagai bupati pada tiga provinsi di Sulawesi Selatan. Nurhayati yang merupakan ibu dari sakhrul juga pernah menjadi anggota Dewan Golkar.

Tanri Olle Yasin Limpo adalah putra Syahrul, Presiden Sakhrul dan DPRD Sulawesi Selatan. Calon DPDRI Nasdem, ia juga bertarung dengan keponakannya Tita.

Syahrul Yasin Limpo sendiri pernah menjabat sebagai

Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 2003 hingga 2008 dan Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 2008 hingga 2018. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRRI pada pemilihan umum 2019.

DAFTAR PUSTAKA

A.Junaidi, HS Eko, Riris Loisa, A.N Cut. Dkk. (2018). *Media dan Komunikasi Politik (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik)*.D.I. Yogyakarta: Mbridge Press

Amelia, Haryanti SH. 2019. *Sistem Politik Indonesia*. Tanggerang Selatan: UPAM PRESS

Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.

Arbi, Sanit. 2015. *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: KendalaPelembagaan dan Kepemimpinan*. Jurnal Ilmu Politik Vol.1

Badrun, Ubaidillah. 2016. *Sistem Politik Indonesia; Kritik dan Solusi Sistem Efektif*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Budiarjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Budiyono. 2016. *Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI JAKARTA 2017*. Jurnal Komunikasi. Vol. 11. No. 1

Distian, Emita. (2018). *Masa Reformasi*. Pontianak: Derwati Press

Djuyandi Yusa. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum.* Humaniora. Vol. 5. No. 2.

Dr Muhammad Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.*

Dr. M. Fadhillah, Harnawansyah, S.Ip, M.Si, *Sistem Politik Indonesia*

Dr. Muhammad, Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*

Dr. Sahya, Anggara. 2013. *Pengantar Sistem Politik Indonesia*, Lingkar Selatan; CV Pustaka Setia

Easton, David. (1965) *A System Analysis of Political Life*, New York: Alfred A.Knopf

Easton, David. (1992). *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara

Edwin Fauzi Irmandini. 2017. *Studi Deskripsi Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Perumusan Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kota Bandung.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Endang, Komara. 2015. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Edukasi jurnal, Sosiso Didakdita, 2015

Fadli, Andi Muh. Dzul. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

Firohatin Ronasifah. Nurul Umiati. Hayat. 2019. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan.* Vol. 13. No. 3.

Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(1), 1-17.

Greenburg, E. (1970). Political socialization. Transaction Publishers.

H. Ibnu. (2004). *KONTRAKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik).* Jakarta : Granit

Hariyono, M. P. (2011). Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik. *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*, 251.

Harnawansyah, M. Fadhillah. (2019). *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Hartono, R. (2016). Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Haryanti, A. Pujilestari, Y. (2019). *Sistem Politik Indonesia*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS

Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu (Wadah informasi Ilmiah)

Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1: 53-62

K. Ujang, R. Asrul. (2020). *SISTEM SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA*. Jakarta : PT Pencerah Generasi Antar bangsa.

Kamaluddin. Undang A. (2014). *Dinamika Politik Di Indonesia (Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi).* Bandung: CV Pustaka Setia.

Kantaprawira, Rusadi. (1977). *Sistem Politik Indonesia (Suatu Model Pengantar)*. Bandung: CV Sinar Baru.

Khoerudin Bambang. 2019. *Organisasi Keagamaan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Lay, Cornelis. (2007). Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* . Vol.11, No.2

Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Muchtar Khoiruddin. 2016. *Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 14. No. 2

Muhamad Rezqi Albyan Pradana. 2021. *Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Muttaqin, Fajriudin. Wahyu Iryana. (2015). *Sejarah Pergerakan Nasional.* Bandung: Humaniora.

Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik. Deepublish.

Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *5*(1), 51-59.

Pribadi, T., Muhyidin, A., & IP, S. Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik. *Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*.

Prosodjo, N. W., & Pandjaitan, N. K. (2015). BAB VII STRATIFIKASI SOSIAL. Sosiologi Umum, 173.

Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama.

R. Wawan. *PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK*. Jurnal Politik. Universitas Garut.

Rahayu. 2010.*Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia*. MMH. Jilid 39. No 2

Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973.

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 44-51.

Ricklefs, M.C. (1989). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Risnawan Wawan. 2017. *Peran dan Fungsi Infastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik.* Dinamika: Jurnal Ilmuah Ilmu Administrasi Negara

Risnawan, Wawan. 2017. *Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik, dalam pembentukan kebijakan publik.* Dinamika: Jurnal Ilmuan Ilmu Administrasi Negara

S. Arbi. (1981), *SISTEM POLITIK INDONESIA (Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan).* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Saputra Inggar. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya. Universitas Mercubuana

Sihombing, S. S. (2021). Sistem Rekrutmen Politik Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Medan.

Singgih, D. S. (2010). Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi. Masyarakat Kebudayaan dan Politik Unair, 20(1).

Sjamsuddin, Nazruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka

Soelistyati Ismail Gani, 1984, Pengantar Ilmu Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta .

Sukarna. (1992). *Sistem Politik Indonesia II*. Bandung: Mandar Maju.

Sukarna. 1981. Sistim Politik. Alumni , Bandung . Eman Hermawan, 2002, Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar, Klik R, Jogjakarta,).

Sulaeman Affan. 2015. *Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala Daerah.* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 1

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.

TANJUNGPINANG, P. H. K., & FAJRI, J. (2016) KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF.

Wahjono, Padmo. Nazaruddin Syamsuddin. (2013). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wawan Muhammad. 2016. KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP), KEKUASAAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM POLITIK. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol. 15. No. 2.

Winarni Fajar. 2008.*Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup.* Mimbar Hukum. Vol 20. No 1.

Zamri. 2020. *Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jurnal Kajian Keislaman. Vol. 2. No. 1

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Dhika merupakan nama pena yang dimiliki oleh sebuah penulis bernama asli Farhandhika Azhar. Farhandhika Azhar lahir di Bogor pada tanggal 19 Mei 2001. Meskipun Dhika tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang sastra, namun ia selalu tertarik dengan bidang menulis. Hal inilah yang membuat Dhika memiliki hobi sebagai penulis. Dhika merupakan mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak masih duduk di bangku kuliah, Dhika sudah sering menulis dan membagikan karyanya diberbagai media online seperti blog dan lain sebagainya.

Penulis bernama Fina Amelia Hidayat, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Oktober 2001, ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia merupakan mahasiswa UIN sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Selain itu ia juga memiliki hobi membaca buku.

Penulis bernama Frida Rahayu Berliana dengan panggilan akrab berbi, ia lahir di kota dodol. Garut 09 September 2001, ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia pun merupakan salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi islam, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Selain itu, ia memiliki bakat dalam ber olahraga renang, dan hobi jalan jalan keliling kota, maka dari itu ia mempunyai cita cita sebagai traveler.

Penlulis bernama Gina Amalia. Pada tahun ini penulis berusia 20 tahun dan sekarang sedang menempuh jenjang S1 dengan gelar S.Sos di Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ia tidak mempunyai sesuatu yang aku sukai secara khusus. Semua dilakukannya didasarkan dengan keinginan. Penulis adalah gadis berdarah asli Sunda yang lahir di Garut pada tanggal 16 Desember 2001 dan aku lahir dari keluarga Muslim.

Penulis bernama Hamia Husni Fadilah. Ia merupakan perempuan kelahiran Tasikmalaya, 14 Oktober tahun 2000. Pada saat ini, ia sedang menempuh pendidikan S1 dengan fokus studi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ia telah mengasah kemampuan menulisnya dengan menulis artikel dan juga opini pada media massa, dan buku ini merupakan buku pertama yang ia tulis bersama rekan penulis lainnya.
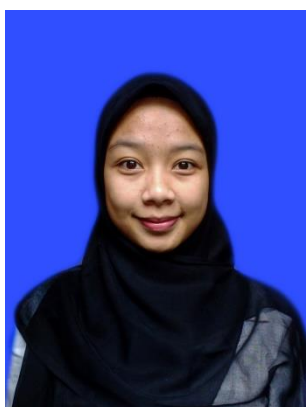
Penulis bernama Iyam Maryam Fauziyyah, tempat lahir Majalengka, 31 Oktober 2000, ia merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Ia merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu ia jga memiliki bakat dalam merias wajah dan ia bercita-cita ingin menjadi seorang konten kreator terkenal.

Namanya ialah Milah Azhari, lahir di Majalengka 4 Desember 2000. Ia adalah anak kesatu dari dua bersaudara. Selama perjalanan hidupnya kata rantaulah yang menjadi sahabatnya, kisah perjalanan hidup milah disusun bagai puzzle di berbagai kota.

Masa kecil dan masa Sekolah dasar ia habiskan di kota kelahirannya Majalengka, sedangkan masa SMP ia habiskan di Kota Ciamis, Lanjut dengan jenjang pendidikan SMA sampai Kuliah ia tinggal di Kota Kembang. Berbagai kisah suka duka telah ia lalui selama masa

perantauan yang membuatnya terjebak suka dalam dunia tulis dan perfilman. Cita citanya sampai saat ini ia ingin sekali pergi lebih jauh menjelajah belahan bumi sambil berbagi cerita lewat buku yang menjadi harapan karyanya.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembentukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan bersama merupakan bentuk dari suatu sistem politik. Oleh karena itu dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, kepala negara dibantu oleh lembaga lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintah yang memiliki kekuatan pada bidang proposisi nya masing-masing.

Salah satu tujuan mendirikan suatu lembaga nonpemerintah dalam pemerintahan dibutuhkan sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah baik secara langsung maupun tidak. Yang mana, dalam ilmu sosial politik atau pemerintahan Dapat disebut dengan infrastruktur politik